

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **16** 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A 17

TAHUN 2006

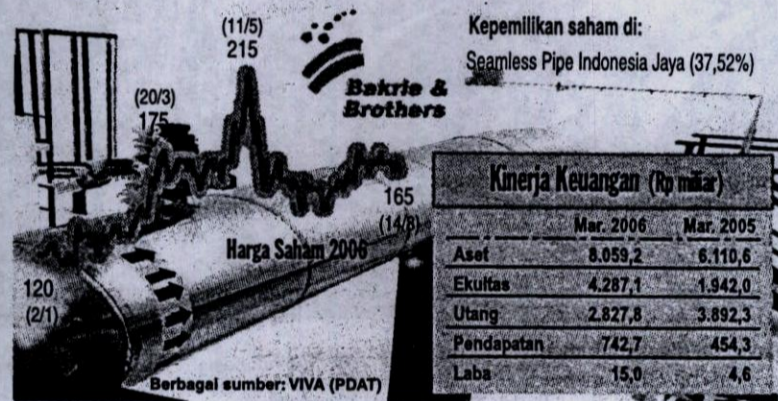
PENDANAAN PROYEK PEMIPAAN GAS Bakrie Kaji Dua Opsi

"Pabrik pipa milik anak perusahaan hanya mampu memasok setengah dari kebutuhan."

JAKARTA — PT Bakrie & Brothers Tbk. tengah mengkaji dua opsi pendanaan untuk membiayai pembangunan jaringan pipa gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah. Dua opsi itu adalah pinjaman bank atau kredit ekspor. Sedangkan kabar rencana penerbitan obligasi untuk membiayai proyek ini tidak mungkin dilakukan.

"Kalau obligasi tak mungkin," kata Direktur Keuangan Bakrie & Brothers Yuanita Rohali kepada *Tempo* di Jakarta kemarin. Pasalnya, jangka waktu obligasi tidak sesuai dengan masa pembangunan proyek tersebut. "Masa jatuh tempo obligasi tidak ada yang selama 7-8 tahun," katanya.

Perusahaan, kata dia, lebih memilih meminjam ke bank atau mencari kredit ekspor. Hingga kini Bakrie & Brothers masih melakukan peninjauan ke beberapa bank. Seperti diketahui, perusahaan milik keluarga Bakrie ini membutuhkan dana sekitar US\$ 1,26 miliar untuk membangun jaringan pipa gas Kalimantan Timur-Jawa Tengah selama tiga tahun. Sebanyak 30 persen dari biaya pembangunan berasal dari modal



perusahaan dan sisanya dari pinjaman.

Ada empat bank yang sudah menyatakan minatnya, yaitu Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui Bank, International Merchant Banker Berhad, dan Mizuho Corporate Bank Ltd.

Analisis Platinum Gemilang Securities, David Ferdinandus, sepakat opsi penerbitan obligasi tidak tepat dilakukan. Pertimbangannya, kasus lumpur panas di Sidoarjo menyeret salah satu perusahaan milik keluarga Bakrie, yaitu PT Lapindo Brantas, yang bisa membawa sentimen negatif. "Kasus ini masih jadi perhatian pasar," katanya.

David menilai opsi pinjaman bank atau kredit ekspor sama-sama menguntungkan bagi perusahaan. Selain itu, dia yakin Bakrie & Brothers bakal gampang mendapatkan

pembiayaan dari perbankan.

Sementara itu, Senior Vice President Infrastructure Support Bakrie & Brothers A.D. Erlangga mengatakan perusahaan tak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pipa dalam proyek tersebut. Kebutuhan pipa gas sepanjang 1.115 kilometer mencapai 400 ribu ton. "Pabrik pipa milik anak perusahaan kami diperkirakan hanya dapat memasok setengahnya," kata dia.

Bakrie & Brothers memiliki beberapa anak perusahaan penghasil pipa, yakni Bakrie Pipa Industries dan South East Asia Pipe Industries. Tapi jenis dan ukuran produk anak perusahaan itu tidak cocok dengan spesifikasi kebutuhan pipa proyek. "Akan dicari dari perusahaan lokal sehingga dapat mendukung pasokan nasional," katanya. ● YULIAWATI

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <u>16</u> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 4		TAHUN 2006



BISNIS/DEDI GUNAWAN

LELANG MIGAS: Presiden & General Manager ExxonMobil Oil Indonesia Inc Peter J. Coleman (*kanan*) memberi penjelasan mengenai proyek Blok Cepu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika, se usai membuka *Jakarta 2006 International Geosciences Conference and Exhibition* di Jakarta, kemarin. Pada kesempatan tersebut Purnomo Yusgiantoro mengumumkan lelang dan penawaran langsung wilayah kerja baru migas tahun 2006.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 18

TAHUN 2006

Ditawarkan, 41 Blok Migas

Cadangan Minyak di Blok Cepu 600 Juta Barrel

JAKARTA, KOMPAS – Setelah tertunda setahun, pemerintah akhirnya mengumumkan penawaran 41 blok migas melalui tender dan penawaran langsung. Pemerintah menjanjikan porsi bagi hasil yang kompetitif bagi perusahaan migas yang mau mengambil blok yang lokasinya sulit.

Pengumuman penawaran blok migas tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Selasa (15/8), saat membuka International Geosciences Conference and Exhibition di Jakarta.

"Penawaran blok migas ini masih dalam kerangka memelihara kepercayaan investor migas. Saya yakin Indonesia masih kompetitif untuk bisnis migas," katanya.

Dokumen penawaran dan proposal sudah bisa diambil pada 28 Agustus. Pemasukan dokumen tender ditutup pada 11 Oktober, sedangkan proposal penawaran langsung ditutup 26 Desember.

Pada tahun 2005 pemerintah menawarkan 86 blok baru, dengan kontrak kerja sama yang berhasil ditandatangani 56 buah. Dari 41 blok tersebut, sebanyak 20 blok ditawarkan melalui ten-

der reguler dan 21 blok melalui penawaran langsung kepada perusahaan yang berminat.

Tidak laku

Blok yang ditenderkan mayoritas berada di wilayah lepas pantai, yaitu di Natuna, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Delapan di antaranya adalah blok-blok yang tidak laku pada tender yang digelar pemerintah tahun lalu karena tak ekonomis.

Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso mengatakan, pemerintah akan menawarkan porsi bagi hasil (*split*) untuk daerah sulit 65:35. Porsi itu lebih rendah dari yang biasa diperoleh pemerintah, yaitu 85:15.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas R Priyono mengatakan, untuk blok yang ditawarkan langsung didominasi perusahaan

nasional. "Sekitar 80 perusahaan nasional, sisanya asing," kata Priyono.

Adapun untuk blok yang ditenderkan tercatat baru ConocoPhillips yang menyatakan berminat. Perusahaan asing lainnya yang terhitung pemain utama di bisnis migas, seperti ExxonMobil, Chevron, dan Total, justru lebih berminat untuk masuk ke penawaran blok berikutnya yang diperkirakan mencapai 30-40 blok.

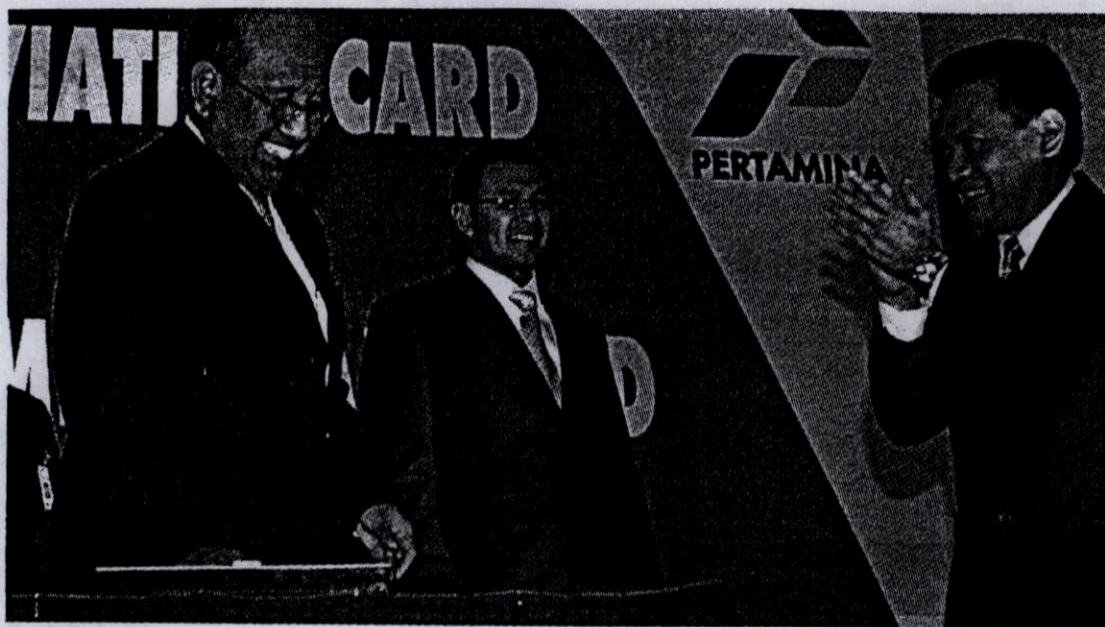
Terkait dengan eksplorasi migas, Komite Kerja Sama Cepu menambah tiga lapangan baru di blok itu, yaitu Kedung Keris, Alas Tuo Barat, dan Alas Tuo Timur. Dengan demikian, total ada delapan lapangan di Blok Cepu.

Deputi Manajer Perencanaan Komite Kerja Sama Cepu Thor Sutan Assir memperkirakan, cadangan Cepu akan bertambah dengan dikembangkannya tiga lapangan baru itu.

Tahun depan ExxonMobil akan mengebor dua sumur eksplorasi di Kedung Keris. Cadangan minyak di Blok Cepu diperkirakan 600 juta barrel, dengan cadangan terbanyak di lapangan Banyuurip. (DOT)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: A. 20												TAHUN 2006																		



Kartu
Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina Arie Soemarno (kiri) menekan tombol didampingi Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo (kanan) dan Direktur Korporasi Bank BNI Achmad Baiquni (tengah) saat peresmian Avian Card dan Gaz Card di Jakarta kemarin.

15

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 7												TAHUN 2006																		

PENJUALAN BBM

Pertamina Luncurkan Kartu Debit

JAKARTA (Suara Karya): Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing menyebabkan Pertamina melakukan terobosan dengan memberikan jaminan kualitas dan kuantitas pelayanan. Terobosan itu dilakukan melalui Pertamina Aviation Card dan Gaz Card, yakni kartu debit khusus untuk mengisi bahan bakar kendaraan.

"Tahap awal, kita sedang menyiapkan 5 SPBU percontohan di Jakarta dan 4 SPBU di Surabaya. Harapannya sudah siap dalam waktu tiga bulan. Nanti bisa dilihat SPBU telah memenuhi standar pelayanan Pertamina akan diberi logo bintang emas dengan layanan setara perusahaan minyak internasional," kata Deputi Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Gedung Pertamina Pusat Jakarta, Selasa (15/8).

Namun, Hanung mengatakan, saat ini masih soft launch untuk dipakai kalangan sendiri dan dipasti-

kan dalam satu bulan sudah akan dipasarkan.

Pada tahap awal, Gaz Card sudah bisa digunakan mulai kemarin di 5 SPBU di Jakarta, yakni SPBU 34.122.09 di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Selatan, SPBU 34.122.08 di Jalan Ciputat Raya, SPBU 34.129.02 di Jalan Gatot Subroto, SPBU 34.175.28 di Jalan Otista KM 19, dan SPBU 34.133.05 di Jalan Otista Raya.

Sedangkan 4 SPBU di Surabaya, berlokasi di SPBU 54.062.70 di Jalan Ngagel, SPBU 54.601.46 di Jalan Arif Rahman, SPBU 54.601.75 di Jalan Tanjung Sari, dan SPBU 54.601.79 di Jalan Kayoon.

Menurut Hanung, Gaz Card itu dapat digunakan dengan mengisinya terlebih dahulu baik melalui bank, phone banking, ATM, maupun internet banking. Khusus untuk ATM atau internet banking, pengisian minimum Rp 25 ribu.

"Pertamina akan memberi layanan

lebih baik, jadi dalam mengisi bahan bakar konsumen tidak perlu turun dari kendaraanya. Persis saat kita menggunakan kartu debit. Berapapun BBM yang dibeli akan dilayani, bahkan meski hanya membeli setengah liter," katanya.

Dia menjelaskan, setelah mengisi dalam jumlah tertentu, maka konsumen selanjutnya tinggal menggesek kartu saat mengisi BBM. Bambang menambahkan, Gaz Card Pertamina itu didukung oleh tiga bank yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI, termasuk dengan bank asing.

Pertamina juga meluncurkan Aviation Card yang juga bekerja sama dengan tiga bank tersebut. Beberapa maskapai sudah berlangganan seperti Adam Air, Sriwijaya Air, dan Lion Air. Aviation card tersebut, baru bisa digunakan di bandara Soekarno-Hatta dan diperkirakan dapat digunakan di seluruh bandara dua bulan mendatang. (Abdul Choir)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																																												
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 6			TAHUN 2006																																										

EKSPLORASI

Pemerintah Lelang 41 Lapangan Migas Baru

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan membuka penawaran 41 wilayah kerja minyak dan gas bumi tahun, 2006 diawali pengambilan dokumen pada 28 Agustus 2006 mendatang. Sebanyak 20 lapangan migas ditawarkan melalui lelang dan 21 lapangan melalui penawaran langsung.

Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso kepada wartawan dalam acara International Geoscience Conference and Exhibition di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta, kemarin.

"Keempat puluh satu lapangan migas ini akan ditawarkan kepada perusahaan nasional maupun asing, blok yang pernah ditawarkan kembali dimasukkan sebanyak tujuh blok," kata Luluk.

Semua perusahaan diwajibkan mengikuti persyaratan dan peraturan yang tertuang dalam dokumen lelang (*bid document*) dan dokumen penawaran langsung (*direct document*).

Pengambilan *bid document* dan *direct document* akan dilakukan pada

28 Agustus 2006.

Batas waktu penyampaian *bid document* paling lambat 11 Oktober 2006, sedangkan *direct document* paling lambat 26 Desember 2006 pukul 14.30 Wib.

Berdasarkan data Ditjen Migas DESDM, penawaran 20 wilayah kerja yang dilakukan melalui lelang meliputi lepas Pantai Natuna yaitu Blok Natuna, Blok Cucut, Blok Dolphin, Blok Cakalang, Blok Kerapu, Blok Baronang. Di daratan Sumatera Selatan (Sumsel) Blok West Air Komerling. Di lepas Pantai Kalimantan Timur (Kaltim) Blok Southeast Mahakam, Blok Tigau, Blok Mentana.

Di lepas Pantai Sulawesi Barat (Sulbar) yaitu Blok Karama, Blok Malunda, Blok Mandar. Lepas Pantai Sulawesi Selatan (Sulsel) yaitu Blok Madang, Blok South Mandar, Blok Sageri, Blok South Sageri. Daratan Sulsel, Blok Enrekang. di lepas Pantai Lampung Blok Lampung 1. Lepas pantai Jawa Barat (Jabar), Ujung Kulon.

Sementara 21 wilayah kerja yang

ditawarkan melalui penawaran langsung adalah lepas Pantai Natuna yaitu Blok Duyung dan Blok Pari. Di daratan Sumatera Utara (Sumut) yaitu Blok Tonga, di daratan Sumatera Tengah yaitu Blok Lemang, Blok Batu Gajah, Blok Batanghari, Blok Sekayu. Sementara di daratan Sumsel yaitu Blok Karang Agung, di daratan dan lepas pantai Jawa Timur (Jatim) yaitu Blok Alas Jati, Blok Gunting, Blok Situbondo, Blok North Kangeang, Blok Sibaru.

Sedangkan di daratan dan lepas pantai Kaltim yaitu West Sangtta, Blok Kutai, Blok Mahakam Hilir, Blok Wain dan lepas pantai dan daratan Sulbar yaitu Kuma, Kudong. Selat Makassar yaitu Blok Karana. Daratan dan lepas pantai Sulawesi Tenggara yaitu Blok Buton. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas R Priyono mengatakan, seluruh perusahaan asing dan lokal yang besar-besar telah menyatakan minatnya. "Estimasi awal kita, 80 persen dari para peminat blok-blok tersebut berasal dari perusahaan lokal," katanya (Abdul Choir)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **16** 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

BAHAN BAKAR GAS

TAHUN 2006

BBG Cair Bertekanan Rendah Dipasarkan Akhir Desember

JAKARTA (Suara Karya): Pertamina berencana akan memasarkan bahan bakar gas atau elpiji cair (liquified gas for vehicle/LGV) pada akhir Desember 2006. Selain lebih ringan dan harga jual tanki lebih murah, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ini tidak tergantung pada jalur pipa gas.

"Nanti akhir tahun ini, Pertamina akan pasarkan LGV. Bahan bakar gas seperti elpiji cair bertekanan lebih rendah kira-kira seperlima belasnya," kata Deputy Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya di Jakarta, Selasa (15/8).

Hanung menjelaskan, bahan bakar tersebut dapat diangkut-pakai dengan menggunakan tanki kendaraan atau dipompakan di SPBU itu. Karena itu, Hanung menilai, bahan bakar semacam LGV sangat cocok digunakan untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan yang tidak berjalan dengan rute tetap seperti kendaraan umum lainnya.

"Jadi pengendara dapat bebas menggunakan bahan bakar tersebut. Namun kita akan memikirkan harga jual yang pasnya," katanya.

Terkait dengan penurunan harga bahan bakar gas (BBG) dari Rp 3 ribu menjadi Rp 2.562 per liter setara premium (LSP) per liter setara premium (LSP) mulai Agustus 2006, dia mengatakan, konsumsi BBG dapat meningkat. Saat ini terdapat 7 SPBBG Pertamina yang sedang direnovasi untuk mendukung program diversifikasi energi yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan dalam 2 bulan ini SPBBG sudah siap untuk mendukung program pemda DKI dalam menjadikan Jakarta bersih," katanya.

Namun menurut Hanung, penurunan harga tidak bisa langsung menaikkan penjualan BBG, karena pengendara harus mengganti konverter kendaraan terlebih dahulu. Pembelian konverter bisa dibeli pasar-pasar yang menjual perangkat tersebut.

"Kalau BBG kan tidak langsung begitu harga turun mobilnya harus ada konverternya dulu. Perhitungan kita, taksi yang sebagian baru menggunakan BBG dapat terus bergeser dari premium ke BBG," ujar dia.

Kendati demikian, dia mengatakan, penurunan harga jual BBG bukan karena disubsidi oleh Pertamina, namun diambil dari keuntungan sesuai keputusan bersama para produsen.

Penurunan itu, kata dia, karena ada penyesuaian harga dari sektor hulu. Penetapan harga ini berdasarkan surat Menteri Negara BUMN tanggal 26 Juni 2006 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Harga dari pipa gas turun dari hulu," katanya.

Kadiv Hupmas Pertamina Toharso mengatakan, penurunan harga BBG juga sebagai upaya untuk menarik lebih banyak konsumen beralih dari BBM ke BBG. "Ini berkaitan dengan program revitalisasi BBG Pertamina," katanya. (Abdul Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

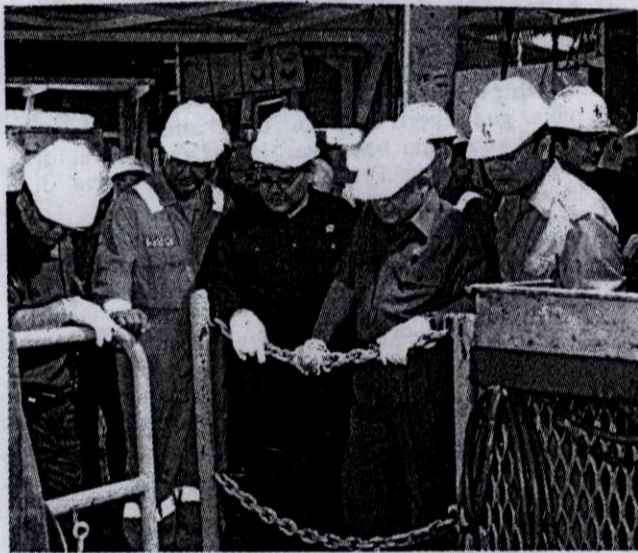
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **16** 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006



PIPA GAS – Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Negara BUMN Sugiharto didampingi Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk WMP Simandjuntak meninjau pelaksanaan proyek transmisi pipa gas South Sumatera-West Java (SSWJ) tahap I di kapal Kuroshio II, sekitar 10 kilometer dari Labuhan Maringgai, Lampung, Sabtu (12/8). Bila proyek ini rampung, PT PGN siap memasok 150 juta kaki kubik gas per hari dari Sumatera ke Jawa bagian barat. (HUMAS PGN)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 2 TAHUN 2006		

Bagi Hasil Tergantung Tingkat Kesulitan 41 Proyek Migas Ditawarkan

JAKARTA (Media): Pemerintah membuka penawaran 41 wilayah kerja migas yang tersebar di daratan dan lepas pantai Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa, kemarin. Sebanyak 20 wilayah kerja ditawarkan melalui proses lelang, sedangkan 21 wilayah kerja lainnya dengan mekanisme penawaran langsung.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso mengumumkan hal itu dalam acara pembukaan pameran dan konferensi geosains internasional di Balai Sidang Jakarta, kemarin.

Berbeda dengan mekanisme lelang, wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung merupakan usulan dari beberapa perusahaan yang berminat melakukan investasi eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah bersangkutan. Dalam mekanisme tersebut, peserta yang mengajukan usulan memperoleh hak memperbaiki penawarannya apabila ada peserta yang mengajukan tawaran lebih baik.

Luluk mengatakan pengam-

bilan dokumen lelang dan dokumen penawaran langsung mulai dibuka pada 28 Agustus 2006. Batas akhir penyampaian kembali dokumen tersebut diatur paling lambat 11 Oktober 2006 untuk mekanisme penawaran langsung dan 26 Desember 2006 untuk proses lelang.

"Soal bagi hasil, kami akan tetapkan berbeda-beda, tergantung tingkat kesulitan eksplorasi dan eksploitasi wilayah kerja tersebut. Kisarannya 60%-80% untuk pemerintah. Untuk daerah *frontier* tentu bisa 60%," paparnya.

Deretan wilayah kerja yang ditawarkan dengan proses lelang antara lain meliputi daerah lepas Pantai Natuna, yakni Blok Tuna, Blok Cucut, Blok Dolphin, Blok Cakalang, Blok Kerapu, dan Blok Baronang. Dua wi-

layah kerja di daerah yang sama, yaitu Blok Duyung dan Blok Pari, masuk kelompok penawaran langsung.

Wilayah kerja yang berada di daratan dan lepas pantai Jawa, tepatnya di Jawa Timur, seluruhnya ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung. Wilayah tersebut mencakup Blok Guntung, Blok Situbondo, Blok North Kangean, Blok Alas Jati, dan Blok Sibaru.

Pada kesempatan yang sama, Luluk menyatakan pihaknya sedang menyiapkan peraturan yang mewajibkan pemasangan alat sensor *lifting* (produksi yang siap dijual) migas di setiap wilayah kontraktor *production sharing* (KPS). Tujuannya untuk mendapatkan data volume *lifting* migas dari setiap KPS secara seketika.

Menurut Luluk, pemasangan sensor telah dilakukan di wilayah kerja Chevron di Pekanbaru, Riau. Dalam waktu dekat, BP Indonesia juga akan memasang alat yang sama di empat titik yang meliputi wilayah-wilayah kerja BP.

Utamakan domestik

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (persero) Hanung Budya mengusulkan agar produksi elpiji nasional diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bila langkah tersebut diterapkan, Pertamina tidak perlu mengimpor elpiji dalam rangka pelaksanaan program substitusi minyak tanah.

Menurut Hanung, mulai tahun depan produksi elpiji nasional akan memperoleh tambahan 1 juta ton, masing-masing 500 ribu ton dari Conoco Philips dan Petrochina.

Kebutuhan elpiji nasional saat ini mencapai 1,1 juta ton, sebanyak 50 ribu ton di antaranya dipenuhi dengan cara impor.

Hanung mengatakan secara teoretis bila semua tambahan produksi elpiji dalam negeri tersebut dialokasikan Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ke Pertamina, impor tidak lagi diperlukan. Seandainya untuk tahun depan.

(Ndy/E-2)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 12		TAHUN 2006

Govt puts 41 oil and gas contracts on the block

The Jakarta Post
Jakarta

The government is inviting foreign and domestic investors to exploit 41 onshore and offshore oil and gas blocks in onshore and offshore Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Java under production-sharing schemes to help boost the country's dwindling oil production.

"We will award contracts for 20 of the blocks through tenders and the other 21 on the basis of direct offers," said Luluk Sumiarso, the director general of oil and gas of the Energy and Mineral Resources Ministry, on Tuesday.

The blocks being put out to tender, of which eight failed to attract bids during previous rounds, are located in the Natuna area, South Sumatra, East Kalimantan, West Sulawesi, Lampung and West Java, he said.

"In Natuna, the government is putting three new offshore blocks — Tuna, Cucut and Dolphin — out to tender, as well as three available offshore blocks — Cakalang, Baronang and Kerapu," he said.

An available block is one that was previously tendered but failed to attract bids.

He said that the government was also tendering the new onshore West Air Komering block in South Sumatra, and the Southeast Mahakam, Tigau and Menatana blocks, all of which are offshore East

Kalimantan.

Also on the table were new blocks at Madang, South Mandar, Sageri and South Sageri off the coast of South Sulawesi, and the Enrekang block in onshore South Sulawesi. The government was also tendering three new offshore blocks in West Sulawesi — Karama, Malunda and Mandar.

In Lampung, the offshore Lampung I block and, in West Java, the offshore and onshore blocks in Ujung Kulon would also be put out to tender.

Luluk said that firms interested in any of the blocks should submit their bids and

proposals to his office starting Aug. 28. He added that the deadline for the submission of direct offer documents was 2.30 p.m. on Aug. 11, while that for bid documents was 2.30 p.m. on Dec. 26.

"For direct offer documents, we will hold them for 14 days. If another company submits better proposals regarding exploration and signature-bonus commitments, then we will select this company," he said.

So far, he explained, 80 percent of the companies making direct offers were domestic firms.

According to Luluk, all

companies had to submit to the same principles regarding the terms and conditions of production-sharing contracts. For example, they would be required to sign 30-year contracts to commercially exploit the oil and gas found, which contracts would be extendible.

The exploration period would last for six years and could be extended for a final four years.

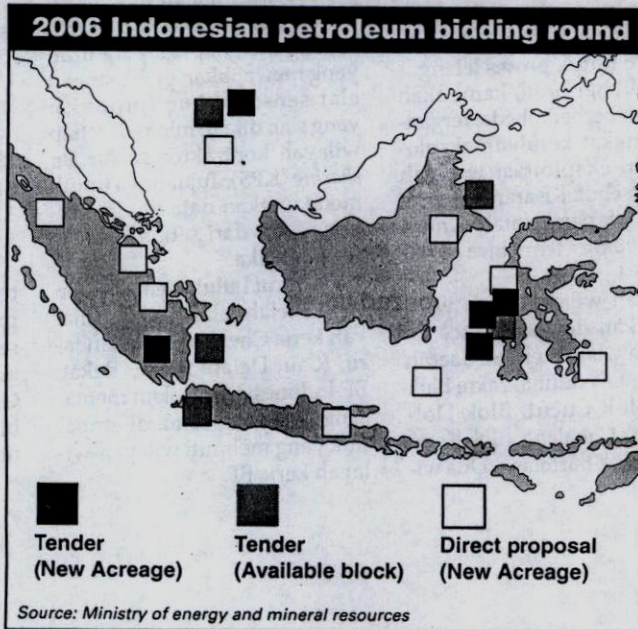
"They must agree that the government will get around 80 percent of the production proceeds in non-frontier areas and around 65 percent in frontier areas," he added.

He said that the Upstream Oil and Gas Regulatory Agency (BP Migas) would evaluate the proposals and bids before determining which firms would be awarded contracts.

The ministry's director of upstream oil and gas development, R. Priyono, said that the participants could obtain bid documents and direct offer documents for a fee of US\$5,000.

The 21 contracts that will be awarded to investors through the direct offer mechanism are located in Natuna, North Sumatra, Central Sumatra, West Sumatra, East Java, East Kalimantan, South East Sulawesi, South Sulawesi and West Sulawesi.

Last year, the government awarded 15 production-sharing contracts following the holding of tenders, bringing the total number of new contracts since 2001 to 86. (05)



21

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ INVESTOR DAILY ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ MEDIA INDONESIA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA ○ SUARA KARYA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ SEPUTAR INDONESIA ○ SUARA PEMBARUAN ○ SINAR HARAPAN ○ TABLOID KONTAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH TRUST ○
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 1	
TAHUN 2006	

Tender 30 blok migas akhir 2006

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Lebih dari 30 blok migas baru di wilayah *frontier* sudah diminati oleh 10 pemain utama migas dunia melalui penawaran langsung.

Padahal pemerintah baru akan membuka lelang dan penawaran khusus putaran kedua itu yang direncanakan pada akhir tahun ini.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Dirjen Migas pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Priyono mengungkapkan 10 pemain utama yang telah menyatakan minatnya di 30 blok tersebut antara lain Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia, ExxonMobil Oil Indonesia Inc, ConocoPhillips, dan China National Offshore Oil Corp (CNOOC).

Seluruh perusahaan yang menyatakan minatnya untuk 30 blok itu, kata dia, wajib melakukan *joint study* blok yang diinginkan dengan menempatkan bank garansi.

"Untuk *joint study* saja harus ada US\$500.000 yang ditempatkan sebagai bank garansi, ditambah lagi kewajiban *signing bonus* minimal US\$1 juta. Jadi sekarang ini dipastikan yang akan ikut adalah mereka yang memang kredibel, serius dan bukan hanya broker saja," tuturnya usai pengumuman lelang dan penawaran langsung putaran pertama di Jakarta kemarin.

Priyono optimistis putaran kedua tersebut akan lebih seru karena banyak sekali pemain utama dunia dalam industri perminyakan yang akan bertarung untuk memperebutkan blok migas.

41 Blok

Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso mengumumkan 41 blok migas yang terdiri dari 20 melalui lelang terbuka dan 21 melalui penawaran langsung.

Untuk penawaran langsung, pemasukan dokumen penawaran akan ditutup oleh Dirjen Migas pada 11 Oktober 2006 dan untuk lelang terbuka diberikan kesempatan hingga 26 Desember 2006.

Pembagian keuntungan di wilayah kerja tersebut berkisar antara 60% hingga 80% untuk pemerintah tergantung wilayahnya.

Blok migas yang ditawarkan melalui tender terbuka adalah Blok Tuna, Cucut, Dolphin di lepas pantai Natuna, Air Komering Barat daratan Sumsel, Blok South East Mahakam lepas pantai Kaltim, Karama, Malunda, Mandar di lepas pantai Sulbar, Sadang, Mandar Selatan, dan Sageri di lepas pantai Sulse.

Delapan blok merupakan blok yang tidak laku pada tender sebelumnya yaitu Blok Cakalang, Kerapu, Baronang, Tigau, Mentana, Enrekang, Lampung I, dan Ujung Kulon.

Blok yang ditawarkan secara langsung a.l. Duyung, Pari di lepas pantai Natuna, Tonga Sumut, Lemang, Batu Gajah, Batanghari daratan Sumatra bagian tengah, Karangagung, Sekayu di daratan Sumsel, Alas Jati, Gunting, Situbondo, North Kangean, Sibaru di daratan dan lepas pantai Jatim. (*dwi.djanuarto@bisnis.co.id*)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <u>16</u> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: A. 2.										TAHUN 2006	

PENYELUNDUPAN BBM

'Raja Minyak' Batam Divonis 1 Tahun

BATAM (Media): Terek Adenan, pengusaha minyak di Batam, divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, dalam kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5.000 kiloliter Juli 2005 senilai Rp1,161 miliar.

Majelis hakim yang diketuai Sutarmo menyatakan, akibat penyelundupan yang dilakukan Terek negara dirugikan Rp1,161 miliar. Selain dijatuhi hukuman penjara, dia juga didenda Rp150 juta.

Usai pembacaan vonis, Terek langsung menyatakan menerima, sedangkan jaksa yang dipimpin M Rum menyatakan pikir-pikir. "Sejak awal, saya sudah siap mental. Apa pun yang hakim putuskan saya terima. Yang penting cepat selesai," ujar Terek.

Dengan putusan itu, Terek akan segera bebas karena dipotong masa tahanan yang dijalannya sejak 26 Agustus 2005. Sebelumnya, Terek telah dijatuhi hukuman enam bulan percobaan dalam kasus penyelundupan BBM sebanyak 7.000 kiloliter pada 2003.

Dalam kasus ini, Terek juga menghadapi perkara tata niaga BBM. Namun, perkara itu menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung.

Belum ditahan

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) belum menahan Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Bandung, Sofyan Sulaeman, dan pimpinan pelaksana Popo, tersangka dugaan korupsi proyek jalan lingkaran selatan Soreang senilai Rp2,8 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Mohammad Yusuf mengatakan, berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak seluruh tersangka kasus korupsi ditahan. "Asalkan ada jaminan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan berbuat hal sama (korupsi). Kenapa harus dilakukan penahanan," jelas Yusuf.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar SL Tobing mengatakan pihaknya tidak melakukan diskriminasi dalam menangani kasus korupsi.

Penetapan Sofyan dan Popo sebagai tersangka setelah tim penyidik Kejati Jabar menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang diambil dari dana APBD Kabupaten Bandung. Di antaranya mengurangi ketebalan aspal serta memanipulasi dana pengurusan.

Sementara itu, DPRD Kota Batam mempertanyakan raibnya APBD 2006 sekitar Rp149 miliar. Komisi II DPRD Kota Batam Yohanes mengatakan DPRD Kota Batam telah mengajukan tambahan anggaran Rp149 miliar karena dana yang telah dianggarkan Rp470 miliar tidak mencukupi. "Hingga saat ini kami tidak mengetahui di mana dana tambahan yang kami usulkan," ujarnya.

Kepala Humas Pemkot Batam Guntur Sakti mengatakan tidak ada anggaran APBD yang raib. Alasannya, seluruh alokasi dana yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di Batam sudah sesuai dengan prosedur.

(ON/EM/SG/HK/N-2)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8

TAHUN 2006

KONVERSI ENERGI

Keputusan Tender Kompor Gas Belum Final

JAKARTA, KOMPAS — Proses tender kompor gas sebagai program konversi energi belum final. Salah satu penyebabnya, pihak Pertamina sebagai calon pembeli belum mengumumkan secara resmi anggaran pembelian kompos gas tersebut.

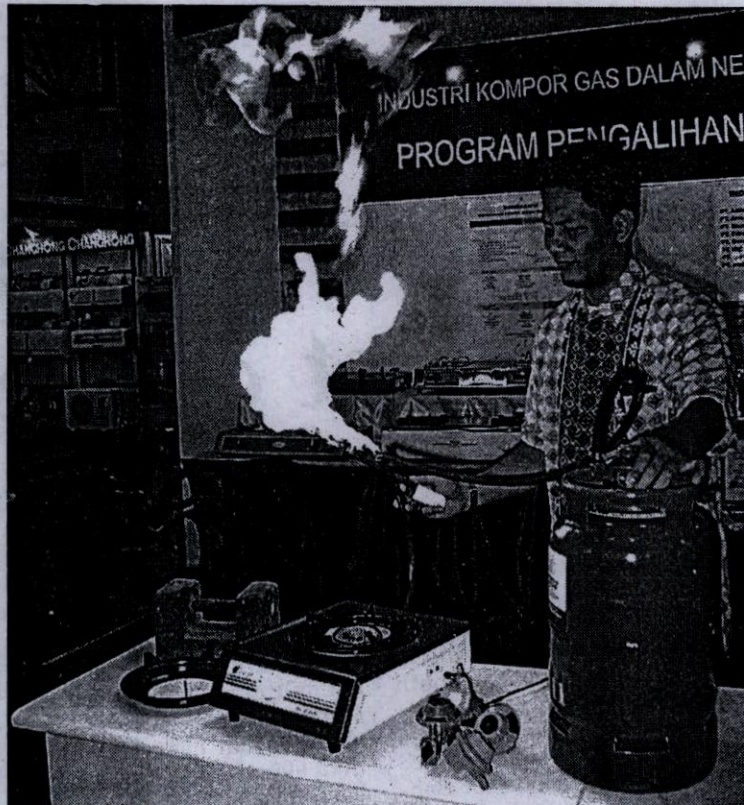
Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Anshari Bukhari ketika mengunjungi stan gabungan elektronik yang memamerkan aneka produk kompor gas di arena Pekan Raya Jakarta, Selasa (15/8).

Anshari menjelaskan, prinsipnya produsen kompor gas sudah siap untuk memproduksi secara massal sesuai dengan standar Departemen Perindustrian. "Sekarang ini kami masih menunggu Pertamina sebagai penyedia seluruh anggaran. Pertamina dipercaya untuk membeli kompor gas dari para produsen, sebelum kompor gas itu disalurkan kepada masyarakat. Program ini juga memerlukan kepastian kesanggupan Pertamina dalam memasok tabung-tabung gas," ujarnya.

Selain Pertamina, lanjut Anshari, proses tender itu juga masih menunggu keputusan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selaku panitia tender kompor gas.

Sejauh ini Departemen Perindustrian hanya bertugas menyiapkan standar nasional industri (SNI), regulasi pemerintah, dan industri-industri yang layak memproduksi kompor gas.

Anshari menyebutkan, untuk tahap pertama (tahun 2006), kompor gas yang akan diproduksi mencapai 4,6 juta unit. Hingga tahun 2010, target penyediaan kompor gas mencapai 90 juta unit. Diperkirakan harga kompor gas plus pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp 132.000 per



KOMPAS/STEFANUS OSA TRIYATNA

unit.

Alexander Aswin, Purchasing Manager PT Rinnasi Indonesia, menuturkan, kuantitasnya sangat banyak. Dalam kaitan itu mesin produksi harus ditambah. Apalagi, komponen pemantik api atau katup penyalur gas harus diimpor dari Jepang, Taiwan, atau China.

"Kalau semua keputusan pihak terkait, seperti Pertamina, sudah jelas, kami sebagai produsen bisa mulai meningkatkan produktivitasnya," kata Alexander.

Direktur PT Metalindo Teratai Putra Kendy Sulaiman mengharapakan standar spesifikasi kompor gas ditetapkan secara tegas agar produsen tidak dikalahkan dengan produk luar negeri yang dikenal lebih murah. (OSA)

Faktor keamanan produk sangat penting. Hal ini dibaca oleh salah seorang produsen regulator tabung gas sebagai peluang bisnis untuk membuat regulator gas yang mampu menghentikan aliran gas jika terjadi kebocoran tabung gas.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <u>16</u> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 15		TAHUN 2006

Oil prices fall as market responds to Mideast cease-fire

Associated Press
Singapore

Oil prices continued to fall Tuesday as the market responded to a nearly day-old cease-fire in Lebanon that ended a month of fighting and eased concerns of a supply disruption in the oil-rich region.

Light sweet crude for September delivery fell 28 U.S. cents to US\$73.25 a barrel in midmorning Asian electronic trading on the New York Mercantile Exchange.

September Brent at London's ICE Futures exchange slipped 35 U.S. cents to \$73.95 a barrel.

A day earlier, oil prices fell as much as \$1.75 a barrel as the cease-fire began and investors responded to news that BP expects to maintain half of its production at a large oil field in Alaska despite a pipeline leak.

In other Nymex trading Tuesday, gasoline futures made a marginal increase to

\$1.9910 a gallon, and heating oil futures rose slightly to \$2.0160 a gallon. Natural gas futures dropped 2.3 U.S. cents to \$6.890 per 1,000 cubic feet.

The cease-fire between Israel and Lebanon's Hezbollah militants took effect early Monday, ending a month of violence that has killed more than 900 people.

Israel's military said Hezbollah guerrillas fired at least 10 Katyusha rockets into southern Lebanon early Tuesday. None hit inside Israel and no injuries were reported.

The market had worried that the conflict might threaten world oil supplies if it spilled into other countries in the region, particularly Iran, OPEC's No. 2 oil producer and a backer of Hezbollah.

Those fears raised crude prices to a record \$78.40 a barrel on July 14, two days after the fighting started.

The other positive market development came late Friday when BP PLC announced it would keep one side of the

Prudhoe Bay oil field open as it replaces corroded pipes, enabling it to funnel up to half its normal output.

BP had previously said it would have to completely shut down the nation's largest oil field after discovering a leak nearly a week ago.

Prices fluctuated widely last week, soaring after BP's initial announcement, then dropping back amid speculation that a foiled terrorist plot against trans-Atlantic flights might dampen jet fuel demand and consumer confidence.

Prices remain supported by the standoff between the United Nations and Iran over its nuclear program as well as supply disruptions in Nigeria due to civil unrest.

Three Filipino oil workers taken hostage in southern Nigeria were released early Monday, hours after witnesses said a new kidnapping occurred at a nightclub as gun battles broke out throughout the country's oil hub of Port Harcourt.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 15		
TAHUN 2006		

Fuel prices bleeding treasury: Indian PM

Agence France-Presse
New Delhi

Indian Prime Minister Manmohan Singh Tuesday said India's economy is on its longest roll ever but that state subsidies on petroleum products are bleeding the national treasury.

"The going has never been as good for India in the past as it is now as our economy has been growing at an impressive pace of over eight percent," Singh said in a national address during 59th Independence Day celebrations.

"Such rapid growth over three successive years is unprecedented in Indian history. Our industry and services

sectors are showing impressive growth," the prime minister said from the Mughal-built Red Fort in the Indian capital.

"The growth of the manufacturing industry touched 11 percent in the last quarter, generating many jobs for our youth and workers," the economist-turned-premier added.

However, rising global fuel prices were of concern to his communist-backed Congress party government.

"Two years ago the international price of oil was just over \$30 per barrel and today it is close to \$75," he said.

"Even though world oil prices have more than doubled, we have succeeded in insulating our consumers to a great

extent... Prices of kerosene and liquid petroleum gas have not been raised," Singh said of the two products widely used as cooking fuel by Indians.

"But there is a limit to which we can go on subsidizing the consumption of petroleum products in the face of rising import costs.

"How much more can the government treasury bear this burden? At some point, this will affect our ability to spend on other important development programs," he warned.

Fuel-starved India imports some 70 percent of its crude oil needs.

Inflation, which rose to 4.67 percent earlier this month, was also of concern to his multi-

party government which owes its 2004 surprise win to support from India's poor masses.

"Each of our families is concerned about the prices of essential commodities but let me assure you that we will do whatever is required to keep prices under check," the prime minister said.

Last month, India's central bank, the Reserve Bank of India, hiked its trend-setting reverse repo rate by 25 basis points to 6.0 percent, the highest level in four years, in a bid to curb inflation.

Inflation, however, remains under the central bank's 5.0-5.5 percent target for the financial year to March 2007, Singh said.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A. 1

TAHUN 2006

KUPANG (Media): Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin meluas. Kini giliran Pulau Rote mengalami kelangkaan solar. Hal itu terjadi sejak tiga hari terakhir.

Kelangkaan solar menyebabkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Rote melakukan pemadaman listrik di wilayah itu mulai Senin (14/8) malam karena tidak memperoleh pasokan solar dari Pertamina.

Hingga pukul 11.00 Wita, kemarin, pemadaman listrik masih berlangsung di enam kecamatan serta di Ba'a, ibu kota Kabupaten Rote. Enam kecamatan, yaitu Rote Timur, Pantai Baru, Rote Tengah, Lobalain, Rote Barat Laut, dan Kecamatan Rote Barat Daya.

BAHAN BAKAR

Giliran Solar Langka di Pulau Rote

Aktivitas warga yang menggunakan tenaga listrik tidak dilakukan sejak Senin malam. Menurut Viktoria Rewati, warga Kota Ba'a, warga menyalakan lilin sebagai penerangan di malam hari. Namun, dia mengatakan, persediaan premium masih cukup.

Pejabat sementara PT Pertamina Cabang Pemasaran Kupang Melkianus Landunau mengatakan pengiriman BBM ke Pulau Rote terkendala cuaca buruk. Dalam minggu ini gelombang

di perairan NTT mencapai empat meter. Waktu tempuh dari Kupang ke Pulau Rote dengan menggunakan perahu motor tujuh jam sedangkan dengan kapal feri selama empat jam.

Rencananya, kemarin pagi, Pertamina Kupang akan memberangkatkan 16 ton solar menggunakan perahu motor dari pelabuhan rakyat Namosain Kupang ke Pulau Rote, tetapi sampai pukul 09.00 Wita keputusan pengiriman solar belum diambil. "Angin di laut masih

kencang," katanya.

Dia mengatakan, pengiriman BBM ke Pulau Rote menemui kendala sejak kapal motor (KM) Timau tidak berlayar akibat ketinggian gelombang laut mencapai empat meter sejak awal Agustus.

KM Timau adalah satu-satunya kapal yang mengangkut BBM dari Kupang ke sejumlah pulau di NTT yang belum memiliki depo, yakni Pulau Rote, Sabu, Raijua, dan Pulau Ndao. Premium yang diangkut kapal itu dikemas dalam drum ukuran 200 liter. Belum berlayarnya KM Timau mengakibatkan kelangkaan premium di Pulau Sabu dan Raijua terus berlanjut. Sebelumnya, premium juga langka di Kota Kupang. (PO/N-2)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2006

Pemerintah Siapkan Desa Mandiri Energi

Jakarta-Pemerintah menyiapkan desa mandiri energi. Tujuannya, agar desa mampu memenuhi sendiri kebutuhan energi, sehingga bisa menghemat penggunaan minyak tanah dan subsidi bahan bakar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf mengungkapkan hal itu ketika menerima kepala desa dan lurah dari 33 provinsi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (14/8). Kepala Desa dan Lurah yang diundang itu merupakan juara satu dalam lomba desa dan kelurahan di tingkat provinsi. Mereka sengaja diundang untuk mengikuti perayaan HUT RI di Jakarta.

Menurut Mendagri, pemerintah sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai desa mandiri energi. Esensinya, agar memberdayakan masyarakat sehingga memenuhi kebutuhan energi melalui pohon jarak dan singkong. "Tapi, hal itu tentu melalui teknologi terapan yang bisa dialihkan dan bisa didayagunakan masyarakat. Penanaman percobaan tanaman jarak sudah dilakukan di NTT, juga di

tempat lain," jelas Mendagri.

Dia menjelaskan, kalau teknologi yang digunakan tepat, masyarakat bisa memproduksi pengganti minyak tanah. Hal itu akan menghemat penggunaan minyak tanah dan subsidi. "Tentu, ini proses, yang membutuhkan sosialisasi," katanya.

Kerja Sama ITB

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Depdagri, Ayip Muflich, mengatakan, pemerintah memang sedang memprogramkan desa mandiri energi dan pangan. Khusus untuk Depdagri, katanya, sudah mulai melakukan langkah awal, seperti mendeteksi lahan kritis yang bisa digunakan untuk menanam Jarak.

"Dalam waktu dekat, kami sedang mempersiapkan kerja sama dengan ITB, guna pemasyarakatan Jarak. Tentu, itu membutuhkan pelatihan dan bagaimana memproses jarak menjadi energi," katanya.

(daniel dukatagukawi)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 6		TAHUN 2006

Pertamina Pasarkan 5.214 Kiloliter "Biodiesel"

Jakarta - PT Pertamina sejak Mei hingga Juli 2006 telah memasarkan 5.214 kiloliter (kl) *biodiesel* yang dijual di lebih 40 Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Jakarta, dengan komposisi campuran 95 persen solar, dan 5 persen *fatty acid methyl ester* (FAME) atau Biosolar B-5.

Achmad Faisal Direktur Pemasaran dan Niaga dalam seminar tentang Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berlangsung di Jakarta, Senin (14/8), memaparkan, di masa depan *biosolar* merupakan salah satu solusi ketergantungan Impor BBM yang memakan biaya sangat besar.

"Program Green Energy akan dapat menghemat devisa negara, sekaligus menciptakan lapangan kerja cukup besar di bidang pertanian, industri, serta efek ganda (*multipplier effect*) hingga di pedesaan," katanya.

Faisal memperkirakan, penetrasi BBN bisa lebih cepat dari yang diperkirakan. Bila bauran 5 P dalam teori pemasaran diperhitungkan

dengan benar, di antaranya *Product* (produk). "Performa minimum harus sama dengan produk BBM yang digantikan," ujarnya.

Berikutnya, *Price* (harga) diharapkan sama dengan harga produk BBM yang digantikan; dan *Place* (distribusi), yakni semakin banyak SPBU atau Depot yang menyediakan BBN, penetrasi akan semakin cepat. Tentunya dengan kontinuitas suplai yang terjamin.

Dan yang tak kalah penting, *Power* (kekuatan). Dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah pusat dan daerah untuk ikut memberikan dukungan penuh. "Bila perlu hanya minyak BBN yang disubsidi, sehingga subsidi tersebut, benar-benar dinikmati masyarakat," katanya.

Di tempat yang sama, Al Hilal Hamdi, Ketua Tim Nasional Pengembangan BBN (*green energy*) menerangkan, implementasi program pengembangan bioenergi di Indonesia bisa menjadi alternatif solusi mengurangi keter-

gantungan Indonesia akan impor minyak bumi (BBM).

Untuk itulah melalui Kepres No 10 Tahun 2006, pemerintah membentuk Tim Nasional Pengembangan BBN, yang telah melakukan berbagai kajian cukup menarik dan menjanjikan bagi terciptanya angkatan kerja baru, yang diperkirakan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, akan mampu menyerap 3 juta sampai dengan 5 juta angkatan kerja baru.

Angka itu diyakini akan dicapai melalui program Green Energy, yakni biosolar melalui bu^{di} daya lebih dari 65 jenis tanaman dan umbi-umbian, antara lain; sawit, kelapa, tebu, singkong, dan berbagai jenis jarak, yang semuanya sangat mudah tumbuh dan dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia.

Mantan Menteri Tenaga Kerja ini memperkirakan, butuh lahan lebih kurang 5,5 juta hektare guna merealisasikan program ini.

(nico sompotan/
gatot irawan)

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ INVESTOR DAILY ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ MEDIA INDONESIA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA ○ SUARA KARYA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ SEPUTAR INDONESIA ○ SUARA PEMBARUAN ○ SINAR HARAPAN ○ TABLOID KONTAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH TRUST ○
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <u>16</u> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN: T.5	
TAHUN 2006	

Konsumsi BBM 10% dari *biofuel*

SURABAYA: Pemerintah menargetkan sampai 2010 nanti pengembangan *biofuel* sudah bisa menyumbang sedikitnya 10% dari total kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan pemerintah semakin serius menggarap program pengembangan *biofuel* (bahan bakar nabati) menyusul rencana penanaman sejumlah komoditas penghasil energi nabati itu di lahan 6 juta hektare di beberapa daerah.

Bahkan, menurut dia, langkah strategis itu telah ditargetkan pada 2010 pengembangan *biofuel* bisa menyumbang 10% dari total kebutuhan BBM dalam negeri.

Purnomo bahkan menjelaskan pengembangan *biofuel* pada tahap awal yang dimulai tahun ini, diharapkan dapat menggantikan sekitar 5% kebutuhan BBM dalam negeri.

(BISNIS/K21/ARD)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <u>16</u> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 7		TAHUN 2006

2007, Pertamina Stop Impor Elpiji

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berencana menghentikan impor *liquefied petroleum gas* (elpiji) pada tahun 2007. Pertamina akan memenuhi kebutuhan elpiji dalam negeri dari produksi kilang di dalam negeri, milik kontraktor *production sharing* (KPS) dan Pertamina.

"Secara teoritis, kalau semua tambahan elpiji dari dalam negeri dialihkan dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas, red) ke Pertamina, kami tidak perlu ada impor lagi," ujar Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Selasa (15/8).

Menurut dia, Pertamina akan mendapat tambahan elpiji 1 juta ton dari ConocoPhillips dan PetroChina, sehingga tidak perlu impor. Pada 2007 kebutuhan elpiji Pertamina mencapai 1,7 juta ton. Jumlah itu termasuk kebutuhan untuk program konversi pengalihan konsumsi minyak tanah ke elpiji mencapai 580.000 ton.

Dia mengatakan, kebutuhan elpiji Pertamina pada tahun 2007 meningkat signifikan. Pada 2006 ini, kebutuhan elpiji Pertamina 1,1 juta ton, yang dipenuhi dari kilang Pertamina 850.000 ton, kilang KPS 200.000 ton, dan 50.000 ton diimpor.

Pertamina sudah berkirim surat dan berbicara secara lisan kepada BP Migas agar Pertamina bisa membeli elpiji ConocoPhillips dan

PetroChina masing-masing 500.000 ton. "Itu sudah direstui pemerintah," imbuhnya.

Dia optimistis, keinginan Pertamina tidak akan ditolak ConocoPhillips dan Petrochina. "Kami beli dengan harga pasar kok. Tentu lebih bagus bagi mereka untuk jual ke kami," tegasnya.

Hanya sayangnya, kata Hanung, penjualan elpiji perseroan tetap akan merugi. Pertamina saat ini harus menjual elpiji Rp 4.250 per kilogram, padahal harga keekonomian elpiji berkisar Rp 6.000-7.000 per kilogram. "Tahun ini saja, kerugian masih akan mencapai Rp 2 triliun," katanya.

Bahan Bakar LGV

Hanung juga menyampaikan, mulai Desember 2006 pihaknya akan memasarkan *liquified gas for vehicle* (LGV), bahan bakar transportasi berbentuk cair seperti elpiji. "Ini upaya meningkatkan pemakaian gas buat bahan bakar transportasi. Kami akan perkenalkan LGV, setelah bahan bakar gas (BBG, red)," ujarnya.

Jika BBG bertekanan tinggi, lanjut dia, LGV tekanannya hanya seperlima belasnya. Menurut dia, tangki LGV juga lebih murah dan ringan, serta stasiun pengisiannya tidak tergantung jalur pipa gas seperti BBG. "Dengan model seperti elpiji, LGV bisa diangkut lebih mudah, ini pas untuk mobil pribadi atau bajaj," tuturnya. (ari)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006



GAZ CARD - Direktur Pertamina Ari H. Soemarno (kiri), menekan tombol didampingi Direktur Bank Mandiri Agus Martowardojo (kanan), dan Direktur Korporasi Bank BNI Achmad Baiquni (tengah), saat peresmian pemakaian Avian Card dan Gaz Card di Jakarta, Selasa (15/8). Pertamina bekerjasama dengan bank milik pemerintah guna meningkatkan layanan dalam penggunaan bahan bakar Pertamina.

Investor Daily/ANTARA/ Ujang Zaelani/ss/dk/06

Pertamina Tingkatkan Layanan dengan Gaz Card

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meluncurkan Gaz Card untuk meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Gaz Card adalah kartu debit khusus untuk mengisi produk BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.

"Kami didukung Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Jadi, konsumen cukup memasukkan uang lewat bank, *phone banking*, ATM atau *internet banking*," kata Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Selasa (15/8).

Menurut Hanung, nantinya konsumen menyetor minimal Rp 25.000 di bank tersebut. Cara penggunaannya, konsumen menunjukkan Gaz Card dan SPBU akan mengisi BBM sesuai permintaan. Namun, satu bulan ini Gas Card hanya digunakan di kalangan internal Pertamina, baru setelah itu diperuntukkan bagi pelanggan. "Sebelum lebaran, kami harapkan SPBU jalur Pantura sudah menggunakannya," jelasnya.

Kemarin, Pertamina juga meluncurkan kartu sejenis untuk jasa penerbangan yang dinamai Aviation Card. Perusahaan penerbangan yang sudah menggunakannya Adam Air, Sriwijaya Air, dan Lion Air. "Saat ini, kartu tersebut baru bisa digunakan di Bandara Soekarno-Hatta," katanya. (ari)

32

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T-5

TAHUN 2006

Pertamina Gaz Card diluncurkan

JAKARTA: Pertamina meluncurkan Pertamina Gaz Card sebagai bentuk layanan transaksi dengan sistem elektronik.

Dengan kartu tersebut, pembeli tidak akan menggunakan uang tunai dalam membeli BBM, namun cukup mendaftar saja sebagai anggota.

"Jadi kami perlakukan pemegang Gaz Card sebagai raja dalam transaksi pengisian BBM, bahkan tanpa perlu turun mobil, dengan kualitas dan produk terjamin," jelas Deputy Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung B. Yuktyanta, kemarin.

Namun untuk satu bulan ini, kartu tersebut hanya bisa digunakan oleh kalangan Pertamina sendiri dan dalam waktu dekat baru akan dikembangkan agar secepatnya bisa digunakan untuk umum.

Gaz Card telah dapat digunakan di lima SPBU Jakarta dan empat di Surabaya. Konsumen kartu itu bisa berupa individual maupun korporat.

Selain itu Pertamina juga meluncurkan produk layanan terbaru yaitu Pertamina Aviation Card yang merupakan kartu pembelian perusahaan yang berbasis *business to business* khususnya dalam transaksi pembelian dan pembayaran bahan bakar pesawat terbang. (RISNIS/08)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

Pemerintah Terlalu Ambisius Soal Bio Energi

[JAKARTA] Pemerintah terlalu ambisius dalam kebijakan pengembangan bioenergi, khususnya biodiesel. Kebijakan ini justru akan membuat industri yang sudah lebih dulu berkembang seperti kelapa sawit menjadi terhambat bahkan berantakan. Seharusnya pemerintah memberi insentif bagi pengembangan industri hilirnya agar industri sawit bisa berkembang.

"Jika terlalu ambisius dan tanpa perencanaan yang benar, akhirnya yang sudah berjalan dengan baik malah jadi berantakan. Pembangunan kilang-kilang minyak terhenti, distribusi kacau. Sekarang saja Pertamina sering kacau distribusi BBM-nya," ucap pengamat ekonomi Faisal Basri, pada diskusi tentang pengembangan bahan bakar nabati, di Jakarta, Senin (14/8).

Faisal mengatakan, kebijakan yang lebih tepat bukanlah dengan "menggunting" produksi minyak sawit untuk biodiesel, namun juga harus memperhitungkan *cost benefit* dari setiap kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Selain itu, pihak swasta ju-

ga sudah memiliki visi dan rencana ke depan yang tidak bisa seenaknya diubah-ubah.

Dingatkan, bahayanya penerapan kebijakan yang bersifat instan dari kemungkinan menyusupnya kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dan kebetulan dekat dengan pusat kekuasaan. Hal ini berpotensi merugikan perekonomian jangka panjang.

Menurutnya, berbagai kebijakan masih mengedepankan ego sektoral, salah satu contohnya revitalisasi sektor pertanian yang masih sebatas retorika.

Diungkapkan, biodiesel memang dapat dibuat dari banyak bahan baku, namun yang paling mudah didapat saat ini adalah kelapa sawit karena sudah berjalan dengan baik. Bahan lainnya adalah kedelai, biji bunga matahari, lemak binatang, minyak biji jarak, bahkan minyak jelantah dapat pula diolah menjadi biodiesel.

Saat ini, katanya, yang paling sering digembargemborkan adalah minyak jarak, padahal penelitiannya belum maksimal, termasuk perhitungan

nilai ekonomis, penanaman, pengolahan, dan pendistribusiannya. Pohon jarak memang potensial dikembangkan di Indonesia namun sifat pohon ini banyak menyerap unsur hara yang dapat merusak kesuburan tanah.

Lebih Mahal

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal mengakui, saat ini harga biodiesel masih lebih mahal dari harga solar dari fosil, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk memasarkan biodiesel di seluruh Indonesia. Secara bertahap dilakukan di kota-kota besar, bahkan di Jakarta ditargetkan dijual di 181 SPBU akhir Agustus ini.

Akhir tahun 2006, tegasnya, semua SPBU di Jakarta diharapkan menjual *bio fuel* atau biodiesel yang sudah dicampur dengan komposisi 95 persen dari solar fosil dan lima persen dari minyak nabati. Di Surabaya sudah dijalankan oleh lima SPBU, dan di Kota Malang dijual premium yang dicampur ethanol lima persen. [S-26]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN: 6											TAHUN 2006

PENGADAAN KOMPOR GAS

**Produsen Desak Pemerintah
Umumkan Pemenang Tender**

JAKARTA (Suara Karya): Produsen kompor gas mendesak pemerintah segera mengumumkan pemenang tender 90 juta unit kompor gas sebagai konversi kompor minyak ke gas. Agar persiapan yang dilakukan produsen lebih matang dan tidak ada alasan industri dalam negeri tidak mampu sehingga dilakukan impor.

Hal ini dikemukakan Masbudi GM PT aditec Cakrawiyasa, Barito Rivera Manager Sales Department PT Sharp, Paulus MH Vice GM Electric Maspion Group, Thomson GM PT Winn Apliance dan Yeani Katt Direktur Marketing PT Denpoo, di sela-sela Pameran Produksi Indonesia ke 6, di Arena PRJ, Jakarta, Selasa (15/8).

Menurut Masbudi, dalam program konversi kompor minyak ke gas ini pemerintah jangan mengambil keuntungan. Sebab dia melihat ada faktor kesengajaan menunda-nunda pengumuman pemenang tender kompor gas. Padahal kalangan industri kompor gas tidak mengalami kendala dalam produksi.

"Kami hanya butuh kepastian, kapan dan berapa banyak. Jika itu telah diumumkan oleh pemerintah maka produsen kompor gas bisa mempersiapkan berapa investasi dan shif yang akan ditambah. Saat ini impor bahan baku dikenai pajak sebesar 15 persen sedangkan impor barang jadi 0 persen. Saya khawatir lamanya (pengumuman) agar ada alasan industri dalam negeri tidak sanggup menyelesaikannya, jadi impor saja lebih murah," kata Masbudi.

Masbudi menambahkan, kekhawatiran akan dilakukannya impor ini dapat dilihat dalam klausul tender Kementerian Negara Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) yang tidak mewajibkan memakai produk dalam negeri. Mereka (Kemenkop dan UKM) hanya memprioritaskan pada rendahnya harga semata.

Sementara Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian (Deperin) Anshari Bukhori yang ditemui di tempat yang sama, mengatakan, baik Deperin ataupun industri produsen kompor gas sudah menyatakan kesiapannya.

"Departemen Perindustrian sudah menyiapkan standarisasi (Standar Nasional Indonesia /SNI) kompor gas, termasuk kesiapan industri produsen kompor gasnya yang mencapai 14 perusahaan. Untuk itu tinggal menyiapkan regulasi teknisnya wajib atau tidak wajib," kata Anshari.

Berdasarkan tender pra-kualifikasi di Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam rangka persiapan produksi kompor gas satu tungku sebagai program pengalihan kompor minyak tanah ke gas, maka industri yang tercatat lulus dalam pra-kualifikasi tender ada 24 perusahaan. Dari 24 perusahaan tersebut, 18 perusahaan tercatat dalam Gabel (Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia).

Kapasitas produksi dari 14 perusahaan tersebut pada tahun 2006 mencapai 6.080.000 unit, dan rencana produksi tahun ini mencapai 4.600.000 ribu unit. Secara bertahap produksinya akan ditingkatkan sampai menjadi 15 juta unit tahun 2007, dan pada akhirnya mencapai 40 juta unit tahun 2010. Kendati demikian, jika dulu ada anggapan apakah nantinya kebutuhan tersebut akan diimpor, semua tergantung Pertamina apa mau dari dalam negeri atau impor. Tetapi Deperin mengharapkan semua dipasok dari industri dalam negeri sesuai Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2006 mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri (BN No. 7343, hal 8B-11B).

"Jadi industri yang sudah mencapai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)nya sampai 40 persen, seharusnya lelangnya dilakukan di dalam negeri. Tetapi peraturan itu berlaku pada tahun 2007. Mereka juga tidak meminta insentif, karena yang diminta adalah bisa atau tidak, ini diprioritaskan untuk industri dalam negeri. Kalau memang bisa diprioritaskan dari industri dalam negeri, maka mereka pada dasarnya menyatakan sanggup untuk mensuplai. Walaupun dari industri luar, maka untuk tender pasti dibuka dan diharapkan akan masuk," kata Anshari.

Pihaknya, telah menetapkan harga perhitungan sendiri (HPS) untuk kompor satu tungku tersebut sebesar Rp 132 ribu per unit. Karena itu apabila diadakan tender, diharapkan harganya akan lebih rendah. Karena itu Deperin mendesak Pertamina mengumumkan pelaksanaan tendernya, karena industri sudah menyatakan siap memenuhi permintaan baik secara teknis dan ekonomis. (Joko Sriyono)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 2											TAHUN 2006																			

REFORMASI SEKTOR ENERGI

Perlu Konsistensi dan Kesungguhan Hati

Ada dua kebijakan besar pemerintah di sektor energi yang cukup penting dan boleh dikatakan diabaikan oleh pemerintah sebelumnya, yakni program penghematan (konservasi) energi dan penggunaan sumber energi alternatif (diversifikasi). Terbaikannya dua kebijakan itu, bisa jadi disebabkan oleh melimpahnya pasokan energi saat itu. Indonesia sebagai negara pengekspor minyak dan gas sangat menikmati 'gemah ripah lohjinawi' nya sumber daya alam tidak terbarukan ini.

Kini, waktu bergulir. Fakta di lapangan yang terjadi adalah energi bukan hanya semakin mahal, tetapi juga semakin susah mendapatkannya. Untuk mendorong gerakan hemat energi, pemerintah pun mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, yang berlaku efektif mulai 19 Juli 2005.

Seruan penghematan sangat bisa dipahami karena berdasarkan indikator elastisitas energi dan intensitas energi, penggunaan energi di Indonesia memang sangat boros dibandingkan dengan banyak negara lain.

Namun, instruksi penghematan energi oleh Presiden hanya akan jadi slogan dan menjadi gebrakan sesaat apabila tidak diikuti oleh kebijakan lainnya. Mengutip pernyataan Emil Salim, langkah penghematan energi harus bersikap menyeluruh dan bersifat jangka panjang.

Kebijakan hemat energi ini hendaknya diikuti sektor lain,

misalnya transportasi. Pemerintah hendaknya mengembangkan kendaraan hemat energi yang menjadi bagian dari kebijakan transportasi.

Sistem transportasi ini juga harus ditopang oleh rencana penataan ruang yang secara efisien membagi fungsi kota dan wilayah agar secara hemat energi mengatur arus gerak manusia, barang, dan jasa. Selanjutnya pengaturan bangunan kantor, mal, dan perumahan harus dipolakan hemat energi fosil dan merangsang penggunaan energi terbarukan

Menurut Emil Salim, untuk mendukung pelaksanaan rencana ini perlu dikembangkan tarif pajak, retribusi, larangan, rancangan, dan segala peralatan kebijakan yang secara sadar menggiring proses pembangunan kejurusan hemat energi dan secara diferensial mengenakan tarif tinggi bagi berbagai wahana yang menggunakan banyak energi fosil.

Instruksi penghematan energi

oleh Presiden juga hanya akan jadi slogan bila pemerintah tidak segera menyadari bahwa permasalahan energi di Indonesia juga tidak terlepas dari kebijakan di antaranya diversifikasi energi. Pemerintah, sudah harus mengoreksi kebijakan pemanfaatan energi fosil.

Namun, diversifikasi selamanya tidak akan berjalan selama masih ada distorsi harga. Selama ini, bahan bakar fosil, terutama minyak mendapat subsidi dalam jumlah yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini menyebabkan sumber energi lainnya menjadi tidak ekonomis untuk dikembangkan, meskipun jumlahnya memadai.

Pengamat ekonomi Faisal Basri juga menilai murahnya harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia justru mendorong konsumsi tetap, bahkan meningkat. Akibatnya, masyarakat juga tidak memiliki sensitivitas terhadap kelangsungan pasokan sumber energi yang tak dapat diperbaharui tersebut.

"Pertumbuhan kendaraan bermotor semakin tidak terkendali. Kemacetan lalu lintas pun terjadi sehingga menghambat aktivitas perekonomian," kata Faisal.

Menurut dia, strategi harga seharusnya sudah mengacu pada harga dunia secara bertahap dan diimbangi penyediaan bahan bakar pengganti secara massal.

Untunglah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melengkapai paket kebijakan

energi yang menekankan lima langkah fundamental yang harus ditempuh. Lima langkah tersebut selain diversifikasi dan konservasi juga peningkatan kapasitas produksi, kebijakan harga minyak yang tepat, dan penegakan hukum terhadap kejahatan menyangkut BBM.

Jalan keluar utama krisis ini, memang mau tak mau menggeser penggunaan energi ke sumber yang lebih murah dan tersedia melimpah seperti gas dan batu bara.

Pergeseran energi akan memangkas subsidi Rp 63 triliun sehingga kita dapat berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan indeks kesehatan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan yang langsung menyentuh bagian terbesar rakyat Indonesia.

Pengembangan energi nabati (biofuel) juga merupakan satu alternative solusi, meskipun banyak pihak yang masih banyak meragukannya. Namun, kembali lagi, ini tidak bias berjalan sendiri tanpa diikuti oleh kebijakan sector lainnya, seperti perpajakan.

Apapun itu, pemerintah setidaknya sudah mampu mengubah 'paradigmnya' sendiri mengenai energi. Kita hanya bisa berharap, jangan sampai krisis energi berkembang menjadi krisis eksistensi industri sebagai salah satu penopang penting ekonomi negara ini.

(euis rita hartati)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <u>16</u> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 21										TAHUN 2006	

50 Jenis Tanaman Bisa Jadi Alternatif Pengganti BBM

GORONTALO – Sekitar 50 jenis tanaman di Indonesia dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi krisis energi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Dosen dan peneliti di Pusat Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi mengatakan, potensi sumber bahan baku di Indonesia cukup tinggi dan termasuk nomor dua di dunia dalam hal keanekaragaman hayati.

“Terdapat 50 spesies yang dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel untuk mengatasi krisis energi di negara kita,” ungkap Retno, seperti dilansir *Antara* (15/8).

Jenis tanaman yang dapat dikembangkan menjadi bahan bakar nabati

(biofuel) sebagai alternatif BBM diantaranya kelapa sawit, jarak, jarak pagar, kemiri, kemiri cina, saga utan, kecipir, kapok, tengkawang tungkul, tengkawang terindak, mindi, margosa, bengku, kelor kenari, rambutan, sirsak, dan wijen.

“Itu hanya sebagian kecil dari jenis tanaman yang telah diteliti potensi kandungannya dan mampu menggantikan kerosene yang selama ini digunakan sebagai BBM,” tambah dia.

Selain 50 spesies yang telah diteliti, lanjut Retno, sebenarnya masih banyak jenis tanaman lain yang berpotensi sebagai penghasil minyak nabati dalam pengembangan biofuel, namun masih perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih dalam.

“Jadi rakyat Indonesia tidak perlu khawatir dengan krisis BBM karena

kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain,” ujar dia.

Menurut Retno, pengembangan industri biofuel di Indonesia dengan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri sangat mungkin dilaksanakan mengingat sistem tahapan proses dan teknologi produksinya relatif sederhana dan telah mapan.

Pengembangan biofuel di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) RI No 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Biofuel Sebagai Bahan Bakar lain yang diinstruksikan kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan, Transportasi serta seluruh Gubernur dan para bupati maupun walikota sebagai pelaksana. (one)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <u>16</u> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 14		
TAHUN 2006		

Pengapalan Produksi Migas Nasional Diperketat

JAKARTA— Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) akan memperketat pengawasan terhadap proses pengapalan hasil produksi migas nasional. Ke depannya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas DESDM akan memasang alat sensor pada setiap tempat *lifting*.

Dirjen Migas DESDM, Luluk Sumiarso, menuturkan selama ini laporan hasil produksi migas yang dikapalkan untuk penjualan ke luar negeri disampaikan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) secara manual. "Sekarang kami

akan pasang alat di ujungnya sehingga *real time* bisa dicatat. Dipasanginya di ujung tempat *lifting*, yaitu tempat pengangkutan dan pengapalan," ujarnya kepada wartawan kemarin (15/8).

Pemasangan alat sensor ini, kata Luluk, diharapkan dapat memperbaiki proses pengiriman ekspor migas Indonesia di masa mendatang. Dengan diterapkannya sistem pengawasan seperti ini, tambah dia, pemerintah pusat dapat mengetahui secara pasti berapa besar bagian produksi migas dari masing-masing daerah penghasil migas.

"Nanti kita akan sebarakan ini di semua tempat *lifting*, karena ini kewajiban KPS (kontraktor production sharing). Karena berdasarkan UU semua data eksplorasi dan data produksi adalah milik negara. Apalagi ini menyangkut kekayaan negara, jadi kami akan aktifkan catatan ini agar mencerminkan apa yang terjadi," tandasnya.

Menurut data BP Migas yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada 12 Juni 2006, realisasi produksi migas Indonesia pada tahun 2002 sebesar 2,937 juta barel

per hari, tahun 2003 mencapai 2,901 juta barel per hari, tahun 2004 sebesar 2,832 juta barel per hari, dan tahun 2005 sebesar 1,075 juta barel per hari. Sementara untuk tahun 2006, pemerintah menargetkan perolehan produksi migas 1,110 juta barel per hari.

Sementara Kepala BP Migas, Kardaya Warnika, menuturkan pihaknya siap untuk melaksanakan ketentuan baru tersebut. "Ya benar ada proyek sensor untuk *lifting migas*, kalau pemerintah mau seperti itu ya kami siap saja untuk melaksanakan. Itu proyeknya Ditjen Migas." ■ dia

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 3												TAHUN 2006																		

PANTAU EKSPLORASI MIGAS

Pemerintah Pasang Sensor Elektronik

JAKARTA (SINDO) - Guna memantau eksplorasi minyak dan gas (migas), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) akan memasang sensor elektronik. Alat itu akan melaporkan data eksplorasi migas secara *real time* dengan menggunakan satelit di seluruh kontrak *production sharing* (KPS).

Pemasangan alat tersebut akan dilakukan bertahap, dimulai dari lapangan milik Chevron di Pekanbaru.

"Berdasarkan undang-undang, semua data eksplorasi, data pro-

duksi adalah milik negara. Apalagi ini menyangkut kekayaan negara, jadi kami akan aktifkan kontrol itu agar mencerminkan apa yang terjadi," ungkap Dirjen Migas DESDM Luluk Sumiarso di Jakarta, kemarin.

Kini, sudah ada 20 titik lebih yang sudah dipasang sensor elektronik tersebut. Rencananya, kewajiban pemasangan tersebut akan ditunjang dengan Peraturan Menteri ESDM. "Pelaporan ini ada di PP No2/1992 tentang pengawasan eksplorasi dan produksi migas. Akan ada sanksinya," jelasnya.

Tender

Pemerintah menawarkan 41 wilayah kerja migas yang terdiri atas 20 wilayah kerja lewat tender dan 21 wilayah kerja dengan penawaran langsung (*direct offer*). Pemerintah akan memberikan insentif bagi lokasi frontier sebagai upaya meningkatkan produksi migas.

Pengambilan dokumen lelang dan penawaran blok dapat diambil mulai 28 Agustus 2006 dengan batas akhir penyampaian dokumen partisipasi 11 Oktober 2006 untuk penawaran langsung dan 26 Desember untuk lelang. (ahmad senoadi)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 3												TAHUN 2006																		

Ditetapkan, 4 Standar Mutu Kompor Gas

JAKARTA (SINDO) - Pemerintah menetapkan empat standar mutu kompor gas kepada 24 perusahaan produsen kompor gas yang ikut dalam tender rencana pengadaan kompor gas sebagai pengganti kompor minyak tanah.

"Kita menetapkan empat kriteria yang harus dipenuhi produsen kompor gas yang melakukan tender di Departemen Koperasi dan UKM," kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Anshari Bukhari di Jakarta, kemarin.

Menurut Anshari, keempat standar mutu tersebut adalah kompor berbentuk kotak dengan kapasitas satu tungku, tahan tekanan dengan daya beban 20 kg, tidak mudah penyok, dan efisiensi pembakaran mencapai 50%. (sra)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2006

Bisnis biodiesel 'berkibar' 2009

Oleh ISMAIL FAHMI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Bisnis biodiesel dengan bahan baku biji jarak (*jatropha cacus*) diperkirakan baru 'berkibar' pada 2009-2010, sejalan dengan berlangsungnya panen tanaman tersebut dalam skala besar.

Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Al Hilal Hamdi mengungkapkan produksi biodiesel dari bahan baku biji jarak tahun ini masih terbatas.

Sebab pohon penghasil bahan bakar nabati itu, menurut dia, saat ini baru memasuki tahap pembibitan dan penanaman massal di sejumlah provinsi antara lain Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta Bengkulu.

"Produksi tanaman tersebut baru bisa dipanen dalam skala besar pada 2009. Jumlahnya jika diolah menjadi biodiesel mencapai 1.200 juta liter," ujarnya kemarin.

Pada tahun berikutnya, menurut dia, produksi biji jarak menjadi biodiesel bisa meningkat lagi menjadi 1,337 juta liter.

"Peningkatan produksi biodiesel tadi diharapkan dapat mengurangi konsumsi solar di sektor transportasi yang mencapai 27,5 juta kiloliter atau sekitar 40% dari total penggunaan BBM," paparnya.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menjelaskan masih terbatasnya penanaman jarak tahun ini membuat produksi biodiesel tahun depan hanya sekitar 187 juta liter dan pada 2008 produksi dapat digandakan menjadi 337 juta liter.

Produksi tanaman tanaman jarak yang kini sedang dibudidayakan petani, menurut dia,

nantinya disangga oleh 11 pabrik biodiesel yang mampu memproduksi 26.000 ton jarak pagar per tahun atau sekitar 29 juta kiloliter biodiesel.

"Kapasitas produksi 11 pabrik biodiesel itu mampu mencukupi 45% kebutuhan solar untuk transportasi di Jakarta," tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro membenarkan bisnis biodiesel akan mencapai skala komersial pada 2009-2010.

Namun, dia mengakui pemanfaatan bahan bakar nabati itu mempunyai lima hambatan yakni ketersediaan lahan, infrastruktur, pengolahan, pemasaran, dan pendanaan.

"Tapi untuk pemasaran [biodiesel] yang merupakan tanggung jawab pemerintah, sudah ada solusinya, yaitu pembeli siaga," paparnya.

Untuk itu, katanya, Pertamina dan PLN siap jadi pembeli siaga atau *standby offtaker* bagi produk biodiesel nasional.

Al Hilal menambahkan sasaran penjualan biodiesel tidak hanya sektor transportasi, tetapi juga kalangan industri dan pengelola pembangkit listrik.

PLN sendiri, katanya, telah memprogramkan untuk mengganti pemakaian solar dengan biodiesel untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Sejalan dengan kesiapan pengadaan biodiesel, menurut dia, maka penggantian pemakaian bahan bakar tersebut dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap pertama, kata Komisaris Utama PLN itu, penggantian akan dilakukan pada PLTD di Nusa Tenggara Barat dan PLTD Gorontalo. "Seluruh PLTD PLN ditargetkan menggunakan biodiesel pada 2009."

46

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2006

Pertamina Berikan Sanksi kepada SPBU Nakal

[PADANG] Pertamina Unit Pemasaran I Padang, Sumatera Barat, menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal. Mereka yang dikenai sanksi karena melakukan kecurangan dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) khususnya mempermainkan meteran isian.

Kepada wartawan, Jumat (11/8), di Padang, Wira Penjualan Pertamina M Resa mengatakan, beberapa waktu belakang Pertamina Padang melalui bagian teknis operasional bersama dengan Badan Metereologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar telah melakukan pengecekan terhadap sejumlah SPBU di dua kota di Sumbar, yakni Padang dan Padang Panjang. Sisanya masih akan terus dilakukan secara bertahap.

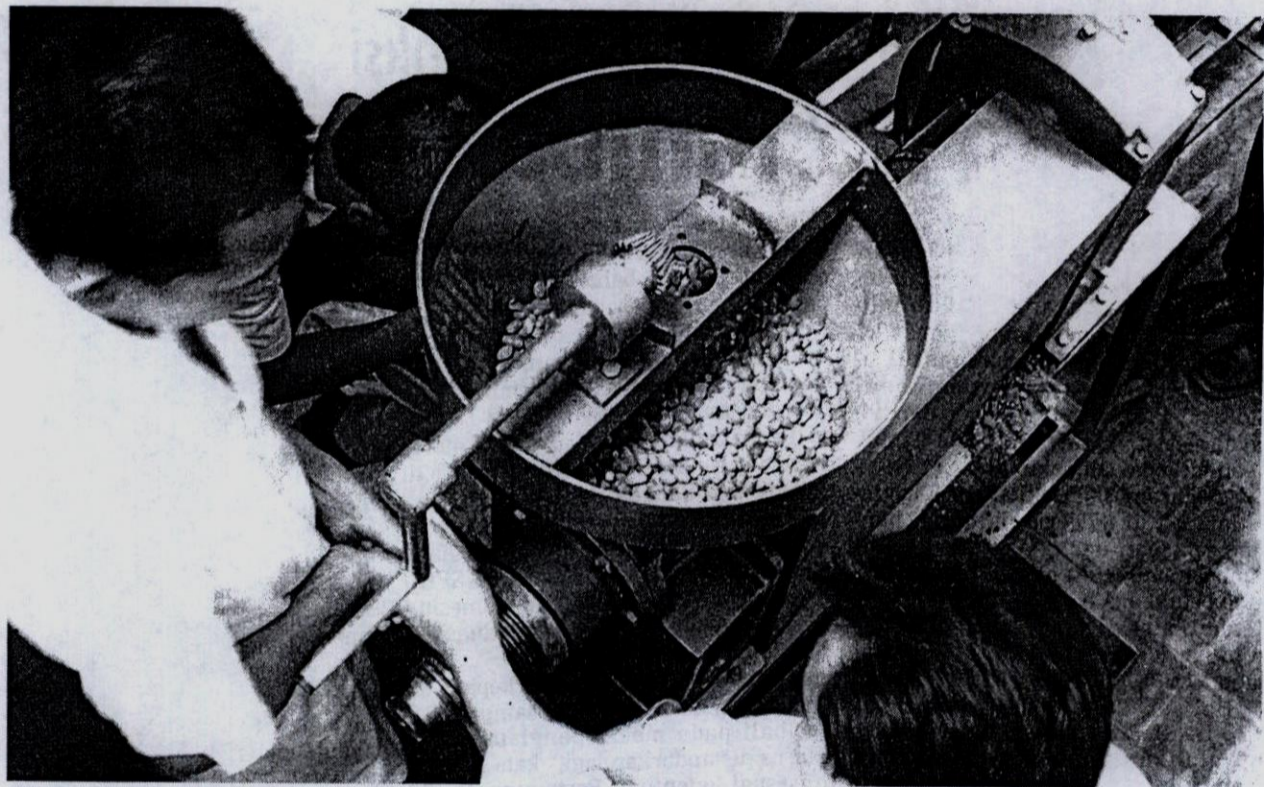
Berdasarkan laporan yang diterima dan hasil kunjungan lapangan, kita menemukan sejumlah SPBU yang nakal yang memainkan meteran isian pada mesin SPBU, katanya. Setidaknya, kata Reza, ditemukan dua SPBU dan telah diberikan sanksi tegas.

"Pertamina telah memberikan sanksi kepada mereka, berupa penghentian suplai ke SPBU itu sampai dilakukan perbaikan kembali pada mesin pengisian, terutama meterannya. Harus distandarkan lagi," kata Reza.

Dijelaskan, sesuai ketentuan Pertamina, SPBU diharuskan untuk melakukan tera ulang alat mereka, minimal sekali dalam setahun. "Bila batas waktunya habis, maka SPBU bisa meminta Metereologi untuk datang ke tempatnya melakukan tera ulang," katanya. [BO/W-8]

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																											
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HALAMAN: 5												TAHUN 2006																	



Menggiling Biji Jarak

Dua mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menggiling biji jarak pagar pada penelitian di laboratorium bioenergi IPB Baranangsiang, Bogor, Jabar, Jumat (11/8). IPB mengembangkan biodiesel yang berasal dari biji jarak pagar untuk mesin diesel dan briket sebagai alternatif pengganti minyak tanah untuk rumah tangga. [Antara/str-JAFKHAIRI]

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

Beli BBM dengan Kartu Kredit

[JAKARTA] Standard Chartered Bank (SCB) menargetkan 10 persen dari total 250.000 pemegang kartu kreditnya melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan kartu kredit di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Shell.

Target tersebut didasarkan pada pertimbangan, transaksi dari tanggal 14 hingga 17 Agustus memberikan pengembalian 17 persen ke pemegang kartu.

Demikian dikemukakan General Manager Credit Cards and Personal Loans SCB, Lina Darmawan pada penandatanganan kerja sama transaksi dengan Shell yang berlangsung di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Lina, program

tersebut dirangkai dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada 17 Agustus 2006. "Kami memberikan penawaran menarik berupa 17 persen *cash back* (pengembalian) bagi pemegang kartu kredit Platinum dan Gold yang mengisi BBM di SPBU Shell," kata Lina

Setelah tanggal 17 Agustus akan dilanjutkan dengan paket program lima persen *cash back* yang bertransaksi dengan menggunakan kedua kartu kredit itu.

Shell sendiri diperkirakan akan menambah jumlah SPBU yang dimilikinya di Jabotabek hingga 10 SPBU. Saat ini Shell melakukan tahap pembelian lokasi serta pembangunan SPBU. [B-15]

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

Pertamina Lanjutkan Proyek Pemipaan Semarang-Gresik

[JAKARTA] Pertamina tidak akan melepas proyek pembangunan pipa transmisi gas ruas Semarang-Gresik yang telah dimenangkannya pada 21 Maret 2006 melalui lelang hak khusus.

Keputusan itu ditetapkan meskipun hingga mendekati tenggat waktu realisasi proyek, Pertamina belum dapat menjalin kerja sama dengan PT Kereta Api (KA).

Kesepakatan kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT KA ini menjadi poin penting bagi Pertamina, karena akan mempengaruhi besar-

nya investasi dan keekonomian proyek.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno, saat ini Pertamina masih mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan upaya pendekatan dengan PT KA.

"Kami diberi waktu dua bulan (untuk menjalin kerja sama dengan PT KA). Sekarang ini sedang dievaluasi, kita lihat saja nanti. Yang pasti, kami akan tetap melanjutkan proyek itu," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH

Migas) selaku pelaksana lelang hak khusus pemipaan gas memberi batas waktu dua bulan, terhitung mulai pertengahan Juli kepada Pertamina untuk meraih kesepakatan kerja sama dengan PT KA.

Batas waktu itu sebenarnya mengacu pada permintaan Pertamina, setelah menerima surat dari PT KA yang menyatakan tidak dapat menjalin kerja sama pemanfaatan lahan. Berbekal surat tersebut, Pertamina pernah mengajukan permintaan negosiasi ulang mengenai tarif pengangkutan gas (*toll fee*)

kepada BPH Migas.

Namun, dengan alasan tidak mau melanggar aturan, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menolak negosiasi perubahan tarif pengangkutan gas yang telah disetujui sebesar US\$ 0,25 per juta British thermal unit (Btu) seperti yang ditawarkan Pertamina pada awal lelang.

Tubagus bahkan mengancam akan mengalihkan hak khusus yang telah dimenangi Pertamina, jika dalam waktu yang ditentukan BUMN itu tidak juga merealisasikan proyek.

[H-13]

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 **16** 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A.20

TAHUN 2006

Asing Minati 15 Lapangan Migas Pertamina

Sebagian besar lapangan migas itu berlokasi di wilayah Sumatera dan Jawa.

JAKARTA — Lebih dari 30 perusahaan multinasional menyatakan tertarik melakukan kerja sama operasi dengan PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) di 15 lapangan minyak dan gas.

Perusahaan-perusahaan asing itu antara lain Petroliaam Nasional Berhad (Petronas), Total Indonesia E&P, Chevron Corporation, Anadarko Petroleum Corporation, dan Eni.

Petronas merupakan perusahaan migas berskala internasional milik pemerintah Malaysia dan sudah beroperasi di lebih 30 negara. Total Indonesia E&P adalah salah satu kontraktor bagi hasil migas terbesar di Indonesia dan perusahaan asal Prancis ini juga tercatat sebagai produsen gas terbesar di Indonesia.

Chevron merupakan salah perusahaan energi global terbesar di dunia yang bermarkas di San Ramon, Cali-

fornia, Amerika Serikat. Anadarko juga merupakan perusahaan asal Amerika Serikat. Sedangkan Eni merupakan perusahaan energi terintegrasi asal Italia yang terdaftar di bursa New York dan Italia.

Direktur Pertamina EP Kun Kurnely mengatakan peminatnya lebih dari 200 perusahaan, 30 perusahaan di antaranya berasal dari asing. "Kami harap bulan ini dapat dibuka data blok migas yang ditawarkan, setelah mendapat persetujuan BP Migas (Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)," kata Kun kemarin.

Pertamina, Kun melanjutkan, akan melelang 15 lapangan migas yang terdiri atas 9 lapangan produksi dan 6 eksplorasi. Sebagian besar lapangan migas itu berlokasi di wilayah Sumatera dan Jawa. Satu lapangan eksplorasi juga ada di wilayah Kalimantan

dan satu lapangan eksplorasi di wilayah Papua. "Kebanyakan *on shore* (eksplorasi di darat)," ujar dia.

Soal bagi hasil, Kun mengatakan, tidak menjadi persoalan karena bagian pemerintah tetap 60 persen dan Pertamina 40 persen. Investor juga akan mendapatkan bagian dari Pertamina. "Yang penting bagi hasilnya tidak lebih besar dari lapangan yang ada di sekitar lapangan yang sudah kerja sama operasi," katanya.

Pertamina sebenarnya berencana membuka tender 15 lapangan migas ini bulan lalu. Namun, sampai sekarang *molor* dari rencana yang dijadwalkan karena masih menunggu persetujuan dari BP Migas.

Kun berharap BP Migas segera memberikan persetujuan sehingga Pertamina bisa segera membuka tender penawaran 15 lapangan migas tersebut.

Menurut Kepala BP Migas Kardaya Warnika, secara prinsip BP Migas sebenarnya telah menyetujui rencana Pertamina menawarkan 15 lapangan migas. Begitu pula soal bagi hasil, BP Migas menyepakati bagi hasil untuk pemerintah 60 persen, Pertamina 40 persen, dan mitra kerja sama mendapat bagi hasil dari jatah Pertamina.

Hanya, dia menambahkan, BP Migas masih harus menyelesaikan beberapa masalah teknis, seperti bagi hasil untuk lapangan migas tua karena lapangan tua itu nantinya hanya akan diambil sebagian saja.

"Teknis bagaimana bagi hasilnya nanti itu yang masih dibahas," kata Kardaya kepada *Tempo*.

BP Migas menargetkan akan menyelesaikan masalah ini akhir Agustus sehingga Pertamina bisa membuka tender pada September nanti. ● MUHAMMAD FASABENI

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A 18

TAHUN 200

Produksi Minyak Akan Dipantau Lewat Satelit

JAKARTA — Pemerintah berencana memasang alat pemantau produksi minyak pada setiap lapangan minyak di Indonesia. Alat tersebut akan mencatat secara *real time* jumlah produksi minyak yang dihasilkan



Luluk Sumiarso

dari kontraktor bagi hasil.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Luluk Sumiarso, alat pemantau akan dipasang pada saat minyak akan dikapalkan. Dia menjelaskan alat tersebut akan terhubung dengan satelit sehingga bisa dipantau dari Jakarta. Data ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menetapkan bagian untuk daerah.

Luluk menargetkan hingga akhir tahun alat pemantau akan dipasang di 20 lokasi. Pemasangan alat tersebut akan dilakukan secara bertahap. "Kami akan siapkan peraturan menteri," ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, untuk tahap awal, alat pemantau telah dicoba pada kontraktor bagi hasil Chevron di Pekanbaru, Riau. Sedangkan pemasangan alat pada kontraktor BP Indonesia dilakukan di empat lokasi pengapalan. "Hasilnya cukup baik," katanya.

Luluk menambahkan, se-

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, data eksplorasi dan produksi merupakan milik negara. "Karena menyangkut kekayaan negara, kami akan aktifkan catatan

ini agar mencerminkan apa yang terjadi," ujarnya.

Kepala Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika mengatakan mendukung rencana penggunaan alat pemantau produksi minyak tersebut. Namun, kata dia, dibutuhkan peraturan baru untuk menghindari tuntutan hukum.

Menurut Kardaya, selama ini kegiatan pemantauan produksi minyak dilakukan secara manual. Pencatatan dilakukan setiap hari dengan memberi tanda tangan pejabat berwenang. "Itu aturan dari Bea dan Cukai. Kalau mau menggunakan alat *monitoring*, itu harus diubah dulu peraturannya," katanya kemarin.

Dia mendukung rencana penggunaan alat pemantau produksi minyak karena sudah dilakukan di beberapa negara. "Itu proyek Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tapi belum final," ujarnya. ● MUHAMMAD FASABEN

52

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

Utang ADB buat PGN tanpa Jaminan

SEBULAN lalu, dalam rubrik ini juga, KONTAN mengabarkan bahwa operasional sumur gas Pertamina di Pagardewa, Sumatra Selatan, tersendat gara-gara belum ada pipa yang memadai untuk mengalirkannya (*KONTAN No. 40/X, 10 Juli 2006*). Mestinya, gas yang disalurkan oleh proyek senilai US\$ 353 juta itu bisa mengalir ke Jawa Barat.

Padahal, rencana awalnya, pipa tersebut seharusnya siap beroperasi pertengahan Juni ini. Tapi, entah mengapa, target penyelesaian seluruh jaringan molor. Kontraktor pembangunan pipa sekaligus operatornya adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Waktu itu PGN mengaku tak ada masalah yang berarti di lapangan. Rupanya, masalah yang terjadi memang bukan di lapangan, melainkan ada di brankas PGN. Agaknya biang keterlambatan itu tak jauh dari masalah dana.

Cuma, masalah dana agaknya te-

lah terpecahkan. Pada 10 Agustus 2006 Asian Development Bank (ADB) mengumumkan kesediaan mereka untuk memberikan pinjaman sebesar US\$ 75 juta. Bersama dengan itu, lembaga keuangan internasional yang bermarkas besar di Manila, Filipina, ini juga menjadi *arranger* pengucuran pinjaman dari beberapa lembaga keuangan dunia, sebesar US\$ 125 juta.

Satu hal yang cukup mengejutkan, utang sebesar itu tersalur tanpa keterlibatan pemerintah sama sekali. Sebagai penjamin pun tidak. Rupanya ADB yakin bahwa proyek senilai US\$ 625,5 juta ini akan mendatangkan untung bagi PGN, sehingga tak akan menyebabkan kemacetan pelunasan pinjaman itu kelak. "Pembangunan pipa ini akan mendukung pertumbuhan di Jawa Barat serta menguatkan reformasi bidang minyak dan gas," kata Stephen N. Edwards, *Structured Finance Specialist* di Departemen Sektor Swasta ADB. □

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T. 7

Oleh YENI H. SIMANJUNTAK
Bisnis Indonesia

Rencana produksi kompor elpiji

TAHUN 200

Tahun	Volume produksi (unit)
2006	4.600.000
2007	15.000.000
2008	24.000.000
2009	32.000.000
2010	40.000.000

Sumber: Produsen kompor gas

Pertumbuhan industri kompor gas stagnan

JAKARTA: Pertumbuhan industri kompor gas nasional tahun ini diperkirakan masih akan stagnan akibat penurunan daya beli masyarakat, setelah pada tahun-tahun sebelumnya hanya mencatat rata-rata angka pertumbuhan 5%-10% per tahun.

Subsidi harga minyak tanah yang masih tetap diberikan pemerintah menyebabkan penetrasi pasar kompor gas masih sangat rendah.

Namun, kebijakan pemerintah yang menggalakkan penggunaan gas sebagai pengganti minyak tanah dengan memberikan 420.000 unit kompor gas gratis kepada masyarakat kurang mampu pada tahun ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri kompor gas nasional.

"Tahun ini sepertinya kinerja industri kompor gas stagnan. Masyarakat belum tertarik untuk menggunakan kompor gas karena harga minyak tanah masih disubsidi dan harga gas masih lebih mahal," ujar Vice GM Electric Maspion Group Paulus M.H. kemarin, di sela-sela pameran produk kompor gas. Pameran diikuti 24 perusahaan peserta tender pengadaan kompor gas tahap I yang diadakan pemerintah.

Dia memperkirakan penjualan kompor gas di pasar nasional berkisar antara 150.000 unit hingga 200.000 unit per bulan.

Sementara itu, PPIC & Purchasing Manager PT Rinnai Indonesia Alexander Aswin mengatakan tren penjualan kompor gas dalam tiga bulan terakhir mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Namun, dia belum dapat menyebutkan besaran peningkatan dan faktor penyebab peningkatan permintaan kompor gas tersebut.

"Belakangan ini memang agak membaik. Tapi saya tidak tahu apa penyebabnya, apakah karena memang sudah mau lebaran atau karena rencana pemerintah yang akan menggalakkan penggunaan kompor gas," kata Alexander.

Penetrasi pasar kompor gas saat ini baru mencapai 12% hingga 13% dari total rumah tangga di Indonesia ini.

Selain disebabkan oleh kebijakan subsidi minyak tanah pemerintah, rendahnya penetrasi pasar kompor gas tersebut juga disebabkan oleh distribusi gas yang masih belum merata di seluruh wilayah Tanah Air.

Tingkat utilisasi pabrik kompor gas saat ini diperkirakan 30%-50% dari total kapasitas terpasang industri kompor gas nasional yang mencapai 6 juta unit per tahun.

Alexander memperkirakan kapasitas produksi setiap perusahaan penghasil kompor gas saat ini sekitar 10.000 hingga 70.000 unit per bulan.

Program pengadaan kompor dan tabung gas sebagai upaya mengkonversi konsumsi minyak tanah ke bahan bakar gas, dipastikan akan mendorong kinerja industri besi dan baja nasional.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A 13

TAHUN 2006

Pompa Bensin Tak Siap Jual Biosolar

"Biosolar, habis deh."

JAKARTA — Sejumlah pengelola pompa bensin di Jakarta menyatakan tak siap menjual biosolar. Malah ada pengelola yang mengeluhkan tak lancarnya pasokan biosolar dari Pertamina. "(Sejak menjual biosolar), kami rugi Rp 1,5 juta per hari," kata Yulius, pengelola sekaligus pemilik pompa bensin di kawasan Meruya, Jakarta Barat, kemarin.

Menurut Yulius, kerugian terjadi karena sering terlambatnya pasokan biosolar. Misalnya Yulius memesan biosolar pada Jumat pekan lalu, tapi biosolar baru datang Senin lalu. Akibatnya, selama pasokan biosolar belum datang, satu mesin pengisi milik Yulius tak beroperasi. "Total kerugian kami mencapai Rp 5 juta," kata Yulius.

Pompa bensin milik Yulius menyediakan satu mesin pengisian solar untuk dijadikan mesin pengisian biosolar. Biaya untuk alih fungsi mesin itu sekitar Rp 4 juta: Rp 3 juta untuk pengurusan tangki, sisanya untuk penggantian tulisan solar jadi biosolar.

Selain sering terlambat, menurut Yulius, pasokan biosolar tak mencukupi. Pada Senin lalu, Pertamina mengirim 16 ton biosolar. "Dalam setengah hari sudah habis," katanya.

Saat isi tangkinya terkuras habis, Yulius langsung memesan biosolar lagi. Tapi hingga kemarin Pertamina belum mengirim solar bercampur minyak sawit itu. Akibatnya, di samping mesin pengisi solar, Yulius memasang tulisan "Biosolar, habis deh".

"Kalau begini terus, lebih

baik menjual solar lagi," ujar Yulius.

Pengelola pompa bensin di Jalan K.S. Tubun, Petamburan, juga belum bersedia menjual biosolar. Alasannya, lagi-lagi pengelola masih meragukan kelancaran pasokan bahan bakar pengganti solar itu.

Suparno, seorang petugas, mengatakan, selama ini pompa bensin tempat ia bekerja mendapat kiriman solar setiap dua hari. "Apakah pasokan biosolar akan lancar?" Jika terjadi kekurangan pasokan, "Kami khawatir ditinggal konsumen. Biasanya, telat sedikit saja konsumen langsung pergi."

Sementara itu, pengelola pompa bensin di Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat, mengaku belum melakukan persiapan apa pun terkait dengan rencana penjualan biosolar. Heni Yuliani, pengelola pompa bensin, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari Pertamina. "Kami belum menerima kabar, jadi belum ada persiapan," kata Heni.

Keterangan pengelola pompa bensin berbeda dari penjelasan PT Pertamina sebelumnya. Juru bicara PT Pertamina, Toharso, mengatakan, perusahaan milik negara itu menargetkan 181 pompa bensin (dari total 207 pompa bensin) di Jakarta siap menjual biosolar akhir bulan ini.

Menurut Toharso, pihaknya optimistis dengan target itu karena telah mengecek persiapan semua pompa bensin di lapangan. "Tangkinya sama dengan tangki solar, jadi tinggal *switching* saja," katanya.

● RUDY PRASETYO | DEDEN ABDUL AZIZ |
REH ATEMALEM 5

55

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 75

TAHUN 2006

EMOI temukan 3 lapangan baru

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: ExxonMobil Oil Indonesia Inc (EMOI) menemukan tiga lapangan migas baru di Blok Cepu yang akan semakin mendongkrak jumlah cadangan minyak di blok itu dengan persoalan hukum yang hingga saat ini belum tuntas.

Ketiga lapangan baru itu adalah lapangan Kedung Keris, Alas Tua Barat, dan Alas Tua Timur.

Deputi Perencanaan dan Pengembangan *Joint Operation Committee* (JOC) Blok Cepu Thor Sutanassin mengungkapkan saat ini proses pengeboran untuk tiga lapangan baru sedang dikerjakan.

"*Drill exploration* untuk ketiganya sedang dilakukan untuk mengetahui jumlah cadangan yang ada. Kami sudah melakukan pengeboran beberapa sumur di tiga lapangan itu untuk melakukan eksplorasi," ujarnya usai memberikan presentasi tentang pengembangan Blok Cepu dalam acara *International Geosciences Conference*

and *Exhibition* di Jakarta, kemarin.

Di lapangan Kedung Keris rencananya akan dilakukan pengeboran dua sumur eksplorasi, sementara di dua lapangan lainnya masih belum dijelaskan lebih detail.

Pengeboran eksplorasi di tiga lapangan baru tersebut di luar *plan of development* (PoD) yang diajukan oleh JOC Blok Cepu ke Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

PoD yang sudah direvisi dan disetujui oleh BP Migas dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut hanya untuk pengembangan lapangan Banyu Urip dengan kebutuhan investasi mencapai US\$1,1 miliar.

Persetujuan itu dengan catatan pemerintah mendesak produksi dari Blok Cepu harus dapat terealisasi pada 2008, dipercepat dari target sebelumnya pada 2009.

Ditemukannya tiga lapangan baru tersebut membuat total cadangan migas yang ada di wilayah tersebut akan menjadi semakin meningkat, rencananya produksi dari Blok Cepu akan mencapai 160.000 barel per hari.

Dengan demikian total lapangan di blok tersebut menjadi delapan, lima lainnya yang sudah diketahui cadangannya adalah lapangan Kemuning, Alas Dara, Cendana, Banyu Urip, dan Jambaran.

Dari kelima lapangan itu saja, sudah ditemukan cadangan minyak yang mencapai 600 juta barel, dengan cadangan gas yang masih diperhitungkan namun diperkirakan tidak kurang dari 10 triliun kaki kubik.

Hasil evaluasi yang dilakukan ExxonMobil menunjukkan lapangan

Kemuning, Alas Dara, dan Cendana memiliki kandungan gas sangat besar dengan cadangan minyak sangat kecil sekali.

Sementara di lapangan Banyu Urip jumlah cadangan minyaknya sangat berlimpah hingga 250 juta barel dengan cadangan gas tidak terlalu besar dan di lapangan Jambaran jumlah cadangan gasnya sangat besar namun masih ada cadangan minyak dalam jumlah yang cukup.

Tunjuk asing

Dalam perkembangan lain, Exxon-Mobil Corp menunjuk Brian Boles menjadi General Manager (GM) JOC Blok Cepu yang merupakan operator untuk pengembangan blok minyak raksasa itu.

Vice President Planning, Commercial and Public Affair EMOI Maman Budiman mengungkapkan Boles ditunjuk untuk menjadi GM pengembangan Blok Cepu selama tiga tahun.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai keberadaan dan kewenangan Boles setelah mendapatkan posisi tertinggi dalam proyek yang sempat menjadi sengketa bertahun-tahun.

Sengketa Blok Cepu masih belum berakhir hingga saat ini meski pemerintah sudah menandatangani kontrak kerja sama dengan ExxonMobil dan PT Pertamina untuk melakukan pengembangan blok tersebut.

Sejumlah politisi, anggota DPR, anggota DPD, akademisi, profesional dan mahasiswa melakukan tuntutan hukum agar kontrak kerja sama ExxonMobil di Blok Cepu dibatalkan karena dinilai melanggar UU.

Hingga kini proses tersebut masih terus berjalan setelah pihak yang menamakan diri sebagai Gerakan Penyelamat Blok Cepu melakukan gugatan hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bulan lalu. (dwi.djanuarto@bisnis.co.id)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2006

LELANG 41 BLOK MIGAS

Pemerintah Tawarkan Bagi Hasil Hingga 40%

JAKARTA - Pemerintah menawarkan 41 wilayah kerja blok migas kepada investor dan memberikan bagi hasil hingga 40%. Padahal, selama ini bagi hasil yang diberikan pemerintah rata-rata hanya 15%.

"Perbaikan bagi hasil ini dimaksudkan untuk menarik investor sehingga mereka mau menggarap blok migas di Indonesia," kata Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso, di Jakarta, Selasa (15/8).

Bahkan, untuk wilayah kerja yang sulit (*frontier, red*), pemerintah menawarkan bagi hasil hingga 65%. "*Split* (bagi hasil) untuk negara lebih kecil sekitar 35% untuk wilayah kerja sulit, yang akses infrastrukturnya kurang memadai, dan tingkat kesulitan pengeboran cukup tinggi," kata dia.

Menurut Luluk, perbaikan bagi hasil itu masih menguntungkan bagi negara, kisarannya 60-80:40-20.

Dalam kesempatan itu, Luluk menjelaskan, penawaran blok migas akan dilakukan pada 28 Agustus 2006. "Sebanyak 20 blok migas akan ditawarkan melalui lelang dan 21 lapangan melalui penawaran langsung (*direct offer*).

"Investor asing dan lokal dapat mengikutinya," katanya di sela acara International Geoscience Conference and Exhibition di

Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (15/8). Sejumlah investor yang ikut acara itu, antara lain PT Pertamina (Persero), ExxonMobil, BP, dan CNOOC.

Pengamat migas Kurtubi mengatakan, perbaikan bagi hasil dalam penawaran blok migas saat ini cukup besar. Tetapi hal itu belum menjamin akan membuat investor tertarik. "Untuk menarik investasi migas, masalahnya bukan pada *split*. Inti masalahnya pada perpajakan. Seharusnya pemerintah mengamendemen UU Migas," katanya.

Pasal 31, UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan, investor sektor migas dikenai pajak eksplorasi. "Jadi, meskipun belum menghasilkan minyak, investor sudah dikenai pajak. Inilah yang selalu dikeluhkan para investor dan sudah berkali-kali disampaikan ke pemerintah," imbuhnya.

Saat ini, kata dia, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang membatalkan pasal tersebut. Namun, parlemen belum membatalkan pasal dalam UU Migas tersebut. "Pemerintahnya seharusnya mempercepat amendemen," kata dia.

Kurtubi juga pesimistis target produksi migas sebesar 1,3 juta barel per hari, pada 2009 dapat tercapai. "Target bisa tercapai kalau Blok Cepu berproduksi. Untuk penemuan baru, apalagi dari tender 41 blok migas itu, butuh dua sampai tiga tahun lagi untuk berproduksi," jelasnya.

Lepas Pantai

Luluk menjelaskan, dari 41 blok migas yang ditawarkan, delapan blok pernah ditawarkan sebelumnya, sedangkan yang baru sebanyak 33 blok. Ia menambahkan, 20 blok yang akan dilelang merupakan wilayah yang berada di lepas pantai (*offshore*) Natuna, yaitu Blok

Natuna, Blok Cucut, Blok Dolphin, Blok Cakalang, Blok Kerapu, dan Blok Baronang.

Blok lainnya berada di lepas pantai Sulawesi Barat, yaitu Blok Karama, Blok Malunda, Blok Mandar. Wilayah kerja di lepas pantai Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Blok Madang, Blok South Mandar, Blok Sageri, Blok South Sageri. Wilayah kerja Lepas pantai Lampung, yaitu Blok Lampung, lepas pantai Jawa Barat

57

(Jabar) yaitu Blok Ujung Kulon. Lepas Pantai Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu Blok Southeast Mahakam, Blok Tigau, dan Blok Mentana. "Wilayah kerja di daratan (*onshore*, **red**) yang dilelang yaitu Blok Enrekang (Sulawesi Selatan)," kata dia.

Sebanyak 21 wilayah kerja akan ditawarkan melalui penawaran langsung, yaitu Blok Duyung dan Blok Pari (di lepas pantai Natuna). Wilayah kerja daratan Sumatera Utara (Sumut), yaitu Blok Tonga, di daratan Sumatera Tengah yaitu Blok Lemang, Blok Batu Gajah, Blok Batanghari, dan Blok Sekayu.

Wilayah kerja di daratan Sumsel, yaitu Blok Karang Agung. Wilayah kerja di daratan dan lepas pantai Jawa Timur (Jatim), yaitu Blok Alas Jati, Blok Gunting, Blok Situbondo, Blok North Kangeang, dan Blok Sibaru.

Ada juga wilayah kerja di daratan dan lepas pantai Kaltim, yaitu West Sangtta, Blok Kutai, Blok Mahakam Hilir, dan Blok Wain. Lepas pantai dan daratan Sulbar yaitu Blok Kuma dan Blok Kudong, di Selat Makassar yaitu Blok Karana, dan di daratan dan lepas pantai Sulawesi Tenggara, yaitu Blok Buton.

Penawaran Langsung

Menurut Luluk, blok migas yang ditawarkan melalui *direct offer* diminati investor lokal. "Sekitar 80% blok itu diminati investor nasional, sedangkan yang yang *avail-*

able (pernah ditawarkan, **red**) diminati investor asing," katanya.

Direktur Pembinaan Hulu Migas R.Priyono menambahkan, investor yang tertarik mengikuti lelang dan *direct offer* harus menyediakan bonus minimal US\$ 1 juta dan memiliki bank garansi untuk sektor tekniknya. "Investor yang ikut harus benar-benar kredibel, memilikki uang untuk melaksanakan komitmennya," katanya.

Selain itu, setiap investor nasio-

nal maupun asing harus membayar sebesar US\$ 500.000, yang harus diselesaikan ketika *joint study*. Ketika memasukkan penawaran, investor membayar 20% dari total tanda tangan bonus (*signature bonus*), dan ketika menang, investor membayar seluruhnya dari nilai *signature bonus*. "Penyediaan uang US\$ 1 juta tidak akan menjadi kendala bagi investor nasional karena harga minyak sedang meningkat," katanya. (c94/ari)

Tawaran 41 Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi tahun 2006

oleh Ditjen Migas

No.	Wilayah kerja melalui Lelang	Lokasi	Wilayah kerja melalui Penawaran Langsung	Lokasi
1.	Blok Tuna	Lepas Pantai Natuna	Blok Duyung	Lepas Pantai Natuna
2.	Blok Cucut	Lepas Pantai Natuna	Blok Pari	Lepas Pantai Natuna
3.	Blok Dolphin	Lepas Pantai Natuna	Blok Tonga	Daratan Sumatera Utara
4.	Blok West Air Komerang	Daratan Sumatera Selatan	Blok Lemang	Daratan Sumatera Tengah
5.	Blok South East Mahakam	Lepas Pantai Kalimantan Timur	Blok Batu Gajah	Daratan Sumatera Tengah
6.	Blok Karama	Lepas Pantai Sulawesi Barat	Blok Batanghari	Daratan Sumatera Tengah
7.	Blok Malunda	Lepas Pantai Sulawesi Barat	Blok Karangagung	Daratan Sumatera Selatan
8.	Blok Mandar	Lepas Pantai Sulawesi Barat	Blok Sekayu	Daratan Sumatera Tengah
9.	Blok Madang	Lepas Pantai Sulawesi Selatan	Blok Alas Jati	Daratan Jawa Timur
10.	Blok South Mandar	Lepas Pantai Sulawesi Selatan	Blok Gunting	Daratan dan Lepas Pantai Jawa Timur
11.	Blok Sageri	Lepas Pantai Sulawesi Selatan	Blok Situbondo	Daratan dan Lepas Pantai Jawa Timur
12.	Blok South Sageri	Lepas Pantai Sulawesi Selatan	Blok North Kangeang	Lepas Pantai Jawa Timur
13.	*Blok Cakalang	Lepas Pantai Natuna	Blok Sibaru	Lepas Pantai Jawa Timur
14.	*Blok Kerapu	Lepas Pantai Natuna	Blok West Sangatta	Daratan Kalimantan Timur
15.	*Blok Baronang	Lepas Pantai Natuna	Blok Kutai	Daratan dan Lepas Pantai Kalimantan Timur
16.	*Blok Tigau	Lepas Pantai Kalimantan Timur	Blok Mahakam Hilir	Daratan Kalimantan Timur
17.	*Blok Mentana	Lepas Pantai Kalimantan Timur	Blok Wain	Daratan Kalimantan Timur
18.	*Blok Enrekang	Daratan Sulawesi Selatan	Blok Kuma	Lepas Pantai Sulawesi Barat
19.	*Blok Lampung I	Lepas Pantai Lampung	Blok Kudong	Daratan Sulawesi Barat
20.	*Blok Ujung Kulon	Daratan dan Lepas Pantai Jawa Barat	Blok Karana	Selat Makassar
21.			Blok Buton	Daratan dan Lepas Pantai Sulawesi Tenggara

Keterangan : * merupakan Available Block